

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TIMUR
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun
2010-2015)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**FERRY SUTIONO
155020104111003**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015)"

Yang disusun oleh :

Nama : Ferry Sutiono
 NIM : 155020104111003
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
 Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **16 Mei 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.
 NIP. 196912101997031003
 (Dosen Pembimbing)
2. Dr. Susilo, SE., MS.
 NIP. 196010301986011001
 (Dosen Penguji I)
3. Moh. Athoillah, SE. ME.
 NIK. 2016058411211001
 (Dosen Penguji II)

Malang, 22 Mei 2018
 Ketua Program Studi
 Ilmu Ekonomi,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
 NIP. 196503111989032001



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015)

Yang disusun oleh :

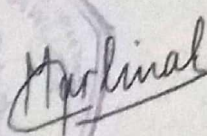
Nama : Ferry Sutiono
NIM : 155020104111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

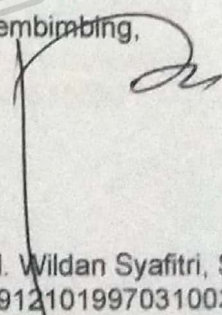
Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Malang, Mei 2018
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi,

Dosen Pembimbing,


Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001


Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME.
NIP. 196912101997031003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ferry Sutiono
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 01 Mei 1988
NIM : 155020104111003
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah
Alamat : Jl. Bunga Kumis Kucing No.1 RT:04 RW:02 Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Malang, Mei 2018

Yang membuat pernyataan,

Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.
NIP.196912101997031003

Ferry Sutiono
NIM.155020104111003



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ferry Sutiono, lahir di Kediri pada tanggal 1 Mei 1988. Putra dari pasangan Cokro Sutiono dan Muryati. Menyelesaikan pendidikan dasar di Kabupaten Kediri dan pendidikan menengah di Kota Kediri. Lulus Program Diploma III Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2010. Memperoleh beasiswa pendidikan S1 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tahun 2015 untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Ekonomi FEB UB. Pengalaman bekerja sebagai staf di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sejak 2010 sampai saat ini. Mendapatkan penugasan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Waingapu tahun 2011-sekarang.

Malang, Mei 2018

Penulis



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul “Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015)”. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam meraih derajat Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang banyak memberikan bimbingan dan arahnya hingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan bapak ibu Dosen yang telah memberikan saran, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani studi di Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Susilo, SE., MS. selaku dosen pembahas seminar proposal sekaligus dosen penguji dalam ujian komprehensif bersama Bapak Moh. Athoillah, SE. ME. yang telah berbesar hati untuk meluangkan waktu dalam memberikan masukan dan perbaikan dalam penulisan skripsi.
4. Para staff pegawai Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

5. Dirjen Perbendaharaan yang telah memberikan beasiswa, serta seluruh pihak dari DJPb yang telah membantu penulis selama penyusunan karya tulis ini serta selama masa perkuliahan.
6. Sembah sujud kepada kedua orang tua dan mertua penulis yang tidak pernah berhenti berdo'a dan selalu memberikan nasehat, motivasi dan dukungan untuk keberhasilan menuntut ilmu.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan secara khusus kepada istri dan anak tercinta dengan kesabaran dan perhatiannya yang tulus serta senantiasa memberikan dorongan emosional dan inspirasional selama kuliah hingga terselesaikannya karya tulis ini.
8. Mas Ponco, Bambang, dan Sintong serta teman teman seperjuangan beasiswa internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berjuang bersama untuk menyelesaikan studi di Universitas Brawijaya.
9. Segenap civitas academica FEB UB yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Serta semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima semua bentuk kritik, masukan, dan tanggapan yang sifatnya konstruktif dari semua pihak. Kemudian tidak lupa harapan penulis semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak termasuk penulis sendiri.

Malang, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teori.....	7
2.1.1 Desentralisasi Fiskal.....	7
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah dan Belanja Modal	8
2.1.3 PDRB dan Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.1.4 Ketimpangan Pendapatan dan Teori Ekonomi Regional	17
2.1.5 Hubungan antara Belanja Modal dengan Ketimpangan Pendapatan	21
2.1.6 Hubungan antara PDRB dengan Ketimpangan Pendapatan	23
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
2.4 Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.3 Definisi Operasional Variabel	31
3.4 Populasi	32
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6 Metode Analisis Data	32
3.6.1 Spesifikasi Model.....	32
3.6.2 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel	33
3.6.3 Pemilihan Spesifikasi Model Terbaik.....	34
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	35
3.6.5 Pengujian Hipotesis	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kinerja Makro Ekonomi Jawa Timur.....	39
4.1.1 PDRB Jawa Timur	39
4.1.2 Struktur Ekonomi Jawa Timur.....	42
4.1.3 Pendapatan Perkapita Jawa Timur	43
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	45

4.2.1	Deskripsi Indeks Gini Provinsi Jawa Timur	45
4.2.2	Deskripsi Rasio Belanja Modal K/L di Provinsi Jawa Timur	47
4.2.3	Deskripsi Rasio Belanja Modal APBD di Provinsi Jawa Timur	50
4.2.4	Deskripsi Variabel Rasio PDRB Sektor Pertanian di Jawa Timur	53
4.2.5	Deskripsi Variabel Rasio PDRB Sektor Industri di Jawa Timur	54
4.2.6	Deskripsi Variabel Rasio PDRB Sektor perdagangan di Jawa Timur	56
4.3	Hasil Analisis Data	58
4.3.1	Pemilihan Spesifikasi Model Terbaik.....	58
4.3.2	Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	60
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	62
4.4.1	Uji Normalitas	62
4.4.2	Uji Multikolinearitas.....	63
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	63
4.4.4	Uji Autokorelasi.....	64
4.5	Uji Hipotesis.....	65
4.5.1	Uji t	65
4.5.2	Uji F.....	67
4.5.3	Uji R^2	68
4.6	Pembahasan.....	69
4.6.1	Pengaruh Belanja Modal K/L Terhadap Ketimpangan	69
4.6.2	Pengaruh Belanja Modal APBD Terhadap Ketimpangan	73
4.6.3	Pengaruh PDRB Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan	79
4.6.4	Pengaruh PDRB Sektor Industri Terhadap Ketimpangan	80
4.6.5	Pengaruh PDRB Sektor Perdagangan Terhadap Ketimpangan	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 :	Definisi Operasional Variabel	31
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa dan Kontribusi Provinsi Jawa Timur Terhadap Perekonomian Nasional	40
Tabel 4.2	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2015.....	46
Tabel 4.3	Hasil Uji Chow.....	58
Tabel 4.4	Hasil Uji Hausman.....	59
Tabel 4.5	Hasil Regresi.....	60
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White)	64
Tabel 4.8	Hipotesis dan Hasil	69
Tabel 4.9	Sebaran Daerah Berdasarkan Variabel Ketimpangan dan Rasio Belanja Modal K/L	72
Tabel 4.10	Sebaran Daerah Berdasarkan Variabel Ketimpangan dan Rasio Belanja Modal APBD.....	77
Tabel 4.11	Sebaran Daerah Berdasarkan Variabel Ketimpangan dan Rasio PDRB Sektor Industri.....	83
Tabel 4.12	Sebaran Daerah Berdasarkan Variabel Ketimpangan dan Rasio PDRB Sektor Perdagangan	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Indeks Gini Indonesia dan 9 Provinsi Tertinggi (2010-2017)	3
Gambar 2.1	Kenaikan Belanja Pemerintah dalam Perpotongan Keynesian	9
Gambar 2.2	Investasi, Depresiasi, dan Kondisi Mapan	15
Gambar 2.3	Dampak pertumbuhan populasi	16
Gambar 2.4	Kemajuan teknologi dan model pertumbuhan Solow	17
Gambar 2.5	Kurva Lorenz	20
Gambar 2.6	Kurva “U Terbalik” Kuznets	24
Gambar 2.7	Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1	Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016	41
Gambar 4.2	Perubahan Struktur Perekonomian di Jawa Timur Tahun 2010-2016	42
Gambar 4.3	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2016	44
Gambar 4.4	10 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur dengan Rata-rata Belanja Modal K/L Tertinggi Tahun 2010-2016	48
Gambar 4.5	Rata-rata Rasio Belanja Modal K/L Terhadap PDRB Di Jawa Timur Tahun 2010-2016	49
Gambar 4.6	10 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur dengan Rata-rata Belanja Modal APBD Tertinggi Tahun 2010-2016	51
Gambar 4.7	Rata-rata Rasio Belanja Modal APBD Terhadap PDRB Di Jawa Timur Tahun 2010-2016	52
Gambar 4.8	Rata-rata Rasio PDRB Sektor Pertanian Terhadap Total PDRB Jawa Timur Tahun 2010-2016	54
Gambar 4.9	Rata-rata Rasio PDRB Sektor Industri Terhadap Total PDRB Jawa Timur Tahun 2010-2016	55
Gambar 4.10	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Terhadap Total PDRB Jawa Timur Tahun 2010-2016	56
Gambar 4.11	Hasil Uji Normalitas	62
Gambar 4.12	Hasil Uji Autokorelasi	65
Gambar 4.13	Distribusi Alokasi Belanja Modal K/L Tahun 2010-2015	70
Gambar 4.14	Distribusi Alokasi Belanja Modal APBD Tahun 2010-2014	75

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Persamaan Matematis Seri Geometri Tak Terhingga
- Lampiran 2 Hasil Pengujian Menggunakan EViews 9
- Lampiran 3 Peta Jawa Timur



ABSTRAK

Sutiono, Ferry. 2018. *Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2015)*. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.

Perkembangan perekonomian di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir memunculkan masalah tersendiri dalam pemerataan pendapatan. Tingginya pertumbuhan ketimpangan pendapatan menjadi problema yang harus diatasi oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah kebijakan fiskal yang diantaranya melalui instrumen belanja pemerintah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga dan pengaruh belanja modal APBD pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dengan mengambil populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio belanja modal K/L terhadap PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Sedangkan rasio belanja modal APBD terhadap PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

Kata Kunci: ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah, belanja modal pemerintah

ABSTRACT

Sutiono, Ferry. 2018. *The Effect of Government Expenditure on Income Inequality in East Java (Case of Regencies/Cities in East Java During 2010-2015)*. Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. Supervisor: Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.

Economic development in East Java in recent years causes another problem of income distribution. The high growth of income inequality becomes serious problem that must be overcome by the government. One of the government's policies is fiscal policy through government spending instrument. Government capital expenditure becomes a special instrument because the characteristics of the goods obtained can provide long-term benefits.

The purpose of this study is to determine the effects of capital expenditure of Ministries/ Agencies and the effects of capital expenditure of local government budgets (APBD) on income inequality in East Java. We analyze 38 regencies/ cities in East Java Province in the period 2010-2015. Using panel data regression model, we found that the ratio of capital expenditure of Ministries/ Agencies to Gross Regional Domestic Product (PDRB) had a negative and significant effect on income inequality in East Java. While the ratio of APBD capital expenditure to PDRB has a positive and significant effect on income inequality in East Java.

Keywords: income inequality, government spending, government capital expenditure

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Makna dari kesejahteraan umum adalah kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia, bukan bersifat khusus untuk golongan tertentu saja. Otonomi daerah menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan umum melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 23 Th 2014).

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah harus didukung sumber keuangan yang memadai. Desentralisasi fiskal yang merupakan penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan, serta kebijakan alokasi belanja pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari adanya pelimpahan kewenangan dalam otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Permasalahan yang umumnya dihadapi terkait kebijakan adalah keterbatasan kemampuan atau potensi fiskal yang dimiliki pemerintah. Kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan fiskal yang ingin dijalankan. Implikasinya tidak semua kegiatan yang diinginkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya dana yang ada. Untuk menyiasati keterbatasan fiskal tersebut, pemerintah diharuskan dapat membuat prioritas kebijakan yang akan dijalankan.

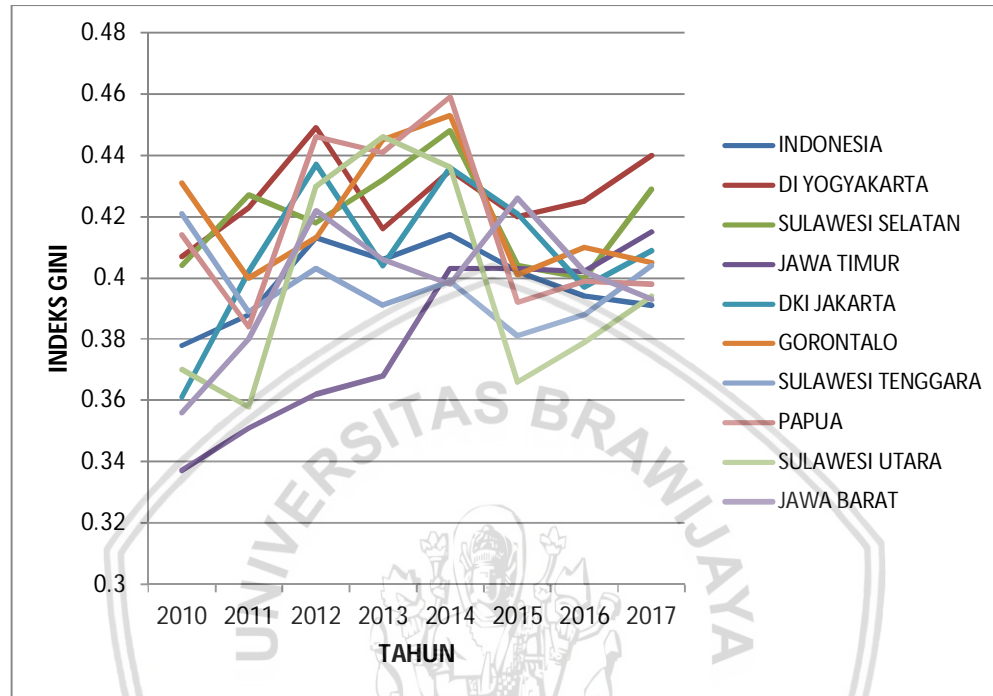
Dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, kebijakan yang menjadi prioritas dapat mengarah kepada kebijakan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) dan kebijakan yang memprioritaskan pemerataan ekonomi (*pro poor*). Melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang melekat pada instrumen fiskal dalam APBN dan APBD, pemerintah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendistribusikan hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut secara lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Tingkat ketimpangan pendapatan menjadi salah satu variabel yang mencerminkan ukuran pemerataan kesejahteraan apakah berlaku umum atau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakatnya. Hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa jadi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat tertentu.

Pada tahun 2017, rata-rata ketimpangan pendapatan di Indonesia cukup tinggi yaitu mencapai angka 0,391 pada ukuran indeks gini. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 9 provinsi yang memiliki angka ketimpangan di atas rata-rata nasional, yaitu DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat.

Perkembangan angka ketimpangan kesembilan provinsi tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.1.

Gambar 1.1 : Indeks Gini Indonesia dan 9 Provinsi Tertinggi (2010-2017)



Sumber: Data Diolah BPS, 2018

Apabila kita cermati lebih lanjut terdapat suatu fenomena dimana angka indeks gini Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah yang paling rendah dibandingkan sembilan provinsi lainnya dalam gambar di atas. Angka ketimpangan Jawa Timur dari tahun ke tahun terus naik hingga akhirnya berada di atas angka indeks gini nasional sejak tahun 2015, dan pada tahun 2017 menempati urutan ketiga provinsi dengan angka ketimpangan pendapatan terbesar di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur yang mana di satu sisi harus tetap menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, sementara di sisi lain juga dituntut untuk menurunkan tingkat ketimpangan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah menggunakan instrumen belanja yang tertuang dalam APBN dan APBD untuk mendanai semua kegiatannya. Sebagian dari belanja pemerintah tersebut dialokasikan dalam pos belanja modal. Belanja modal pemerintah merupakan permintaan atas output perekonomian dalam rangka pembentukan aset yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Oleh karena itu belanja modal menjadi investasi pemerintah pada sektor publik yang sangat penting untuk mendorong perekonomian dan pemerataan pendapatan karena dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan *inkonsistensi* hasil pengujian antara belanja modal dengan ketimpangan pendapatan. Lopez (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Pro-growth, pro-poor : Is there a trade-off?* mengemukakan bahwa infrastruktur publik merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan sekaligus menurunkan ketimpangan. Sementara itu, Utama (2017) menyimpulkan bahwa belanja infrastruktur pemerintah Indonesia tidak berpengaruh terhadap pengurangan ketimpangan tetapi berpengaruh terhadap pertumbuhan. Faktor anggaran yang kecil dan pemerataan sebaran menjadi permasalahan. Kondisi infrastruktur yang tertinggal dan terkonsentrasi khususnya di Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi, menyebabkan belanja infrastruktur tidak signifikan mengurangi ketimpangan.

Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Turnovsky (2015) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa belanja pemerintah untuk modal publik akan meningkatkan ketimpangan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Investasi pemerintah cenderung meningkatkan produktivitas modal swasta yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan distribusi hasil yang tidak merata antara pemilik modal dengan para buruh. Hasil yang sama diperoleh oleh Sabir (2015) dengan studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyimpulkan bahwa

alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya bahwa peningkatan belanja modal dalam APBD akan meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja modal lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di daerah perkotaan dibandingkan alokasi di wilayah pedesaan.

Penelitian terdahulu di tingkat regional atau lokal yang meneliti hubungan antara belanja pemerintah dengan ketimpangan pendapatan umumnya menggunakan variabel belanja pemerintah yang merujuk pada belanja pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah pusat juga ikut berperan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tertuang dalam APBN yang dibelanjakan di tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu ruang lingkup belanja pemerintah yang ada dalam suatu wilayah tidak hanya terbatas pada belanja APBD saja, tetapi juga mencakup belanja K/L yang dibelanjakan di daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penulis melakukan pengujian pengaruh belanja modal pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan. Penulis mengambil judul "Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur" dengan studi kasus pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2010-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan motivasi penelitian, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja modal K/L terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur?

2. Bagaimana pengaruh belanja modal APBD terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal K/L terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur;
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal APBD terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Untuk bahan wacana terhadap kondisi yang dideskripsikan dalam penelitian ini serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.
2. Bagi Dunia Pendidikan
Untuk tambahan referensi serta sebagai kontribusi dalam pelaksanaan penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Desentralisasi fiskal menimbulkan pengelolaan keuangan yang terpisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran belanja pemerintah dalam perekonomian dapat dijelaskan melalui Fungsi Pendapatan Nasional yang dikemukakan oleh Keynes. Sedangkan peran modal atau modal dalam perekonomian dapat dijelaskan melalui Model Pertumbuhan Sollow. Sementara itu, adanya ketimpangan pendapatan dalam ekonomi regional dapat dijelaskan melalui Teori Penyebab Kumulatif yang dikemukakan Profesor Gunnar Myrdal.

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (UU No.23 Th 2014). Desentralisasi fiskal seringkali disamakan dengan otonomi daerah. Menurut undang-undang yang sama, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi daerah otonom memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusannya sendiri dan menolak intervensi pemerintah pusat untuk semua kewenangan yang sudah diserahkan kepada daerah.

Desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap daerah untuk melaksanakan aktivitas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari daerah tersebut. Khusaini (2006:46, dalam Hakim, 2014) mengemukakan bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastruktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah

(sub-national government) daripada oleh pemerintah pusat karena mereka akan lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah dan Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dalam pembentukan pendapatan nasional yang diukur melalui produk domestik bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau produk domestik regional bruto (PDRB) untuk tingkat daerah. Pembentukan PDB tercermin dalam Fungsi Pendapatan Nasional (Y) yang dikemukakan Keynes dalam Mankiw (2007):

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

dimana Y = pendapatan, output, PDB

C = konsumsi

I = investasi

G = belanja pemerintah

X = ekspor

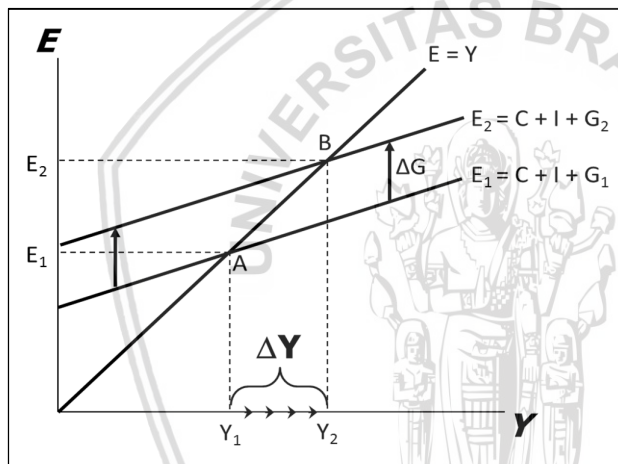
M = impor

Peran pemerintah dalam pembentukan output perekonomian nasional dilambangkan oleh G yang merupakan simbol dari pembelian pemerintah atau belanja pemerintah (*government purchases*). Selain belanja pemerintah, terdapat pembayaran transfer dalam komponen pengeluaran pemerintah. Pembayaran transfer tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan variabel G karena tidak terdapat pertukaran dengan sebagian output barang dan jasa perekonomian. Menurut Jhingan (2016) peranan belanja negara dalam pembangunan ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar

kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, mendorong inisiatif dan usaha swasta, dan mewujudkan keseimbangan regional di dalam perekonomian.

Sebagai salah satu komponen pengeluaran, belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan (Mankiw, 2007). Melalui ilustrasi dengan perpotongan Keynesian pada gambar 2.1 dapat dijelaskan bagaimana kenaikan belanja pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional.

Gambar 2.1 : **Kenaikan Belanja Pemerintah dalam Perpotongan Keynesian**



Sumber: Mankiw, 2007

Dari gambar 2.1 dapat dilihat bahwa kenaikan belanja pemerintah dari G_1 ke G_2 atau sebesar ΔG akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B, dan pendapatan meningkat dari Y_1 ke Y_2 atau sebesar ΔY . Jadi kenaikan belanja pemerintah sebesar ΔG akan meningkatkan pendapatan sebesar ΔY . Dapat kita lihat bahwa kenaikan dalam pendapatan ΔY lebih besar daripada kenaikan belanja pemerintah ΔG yang artinya kenaikan belanja pemerintah memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap pendapatan. Pengganda belanja pemerintah (*government-purchases multiplier*) yang

merupakan rasio $\Delta Y/\Delta G$ mengindikasikan besaran peningkatan pendapatan akibat setiap poin kenaikan belanja pemerintah.

Belanja pemerintah memiliki efek pengganda terhadap pendapatan disandarkan pada asumsi kenaikan pendapatan akan menaikkan konsumsi seseorang berdasarkan fungsi konsumsi $C = C(Y-T)$. Kenaikan belanja pemerintah sebesar ΔG akan meningkatkan konsumsi sebesar $MPC \times \Delta G$, dimana MPC adalah kecenderungan konsumsi marginal. Kenaikan konsumsi ini akan meningkatkan pendapatan yang sama dengan kenaikan konsumsi yang pertama yaitu $MPC \times \Delta G$, yang selanjutnya akan meningkatkan konsumsi yang kedua sebesar $MPC \times (MPC \times \Delta G)$. Proses ini berlanjut berulang-ulang sehingga diperoleh pengaruh total kenaikan belanja pemerintah sebesar

$$\Delta Y = (1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots) \Delta G$$

Maka pengganda belanja pemerintah adalah

$$\Delta Y/\Delta G = 1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots$$

Persamaan untuk pengganda ini adalah seri geometri tak terhingga (lihat lampiran 1) sehingga dapat disederhanakan menjadi

$$\Delta Y/\Delta G = 1/(1 - MPC)$$

Setiap tahun, pemerintah di Indonesia menyusun rencana keuangannya. Rencana pengeluaran pemerintah bersama-sama dengan rencana penerimaan dan pembiayaan tertuang dalam dokumen rencana anggaran yang disusun setiap tahun untuk satu periode anggaran. Dokumen anggaran yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (4), APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan berkaitan erat

dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan anggaran. Sedangkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

Sebagai fungsi alokasi, anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dengan fungsi ini, pemerintah berperan aktif dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi alokasi yang bersinergi dengan fungsi stabilisasi akan menciptakan kondisi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Sedangkan fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Maksudnya bahwa pemerintah diharuskan mengupayakan keadilan dalam distribusi pendapatan dan hasil pembangunan ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Fungsi distribusi berkaitan erat dengan usaha pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan penurunan angka ketimpangan.

Pengeluaran pemerintah secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu (i) pengeluaran pemerintah untuk belanja barang dan jasa, (ii) pengeluaran pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai, dan (iii) pengeluaran pemerintah untuk pembayaran *transfer payment*. Belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi belanja barang dan jasa. Belanja modal digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode anggaran. *Output* dari belanja modal adalah perolehan aset yang dapat memberikan manfaat melebihi satu periode akuntansi sehingga pada umumnya

dapat digunakan dalam jangka panjang sesuai masa manfaat ekonomis aktiva tersebut. Secara garis besar belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

2.1.3 PDRB dan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen (BPS, 2017). PDRB menjadi indikator penting dalam menilai kinerja ekonomi suatu daerah pada periode tertentu. Perekonomian suatu wilayah dikatakan tumbuh dan berkembang jika produksi barang dan jasa pada suatu periode lebih besar daripada periode sebelumnya.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian dan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Sedangkan PDRB atas harga konstan dihitung menggunakan harga pada tahun dasar tertentu dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi menghitung jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi, yang dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha atau kategori, di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Adapun 17 lapangan usaha tersebut antara lain:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
2. Pertambangan dan penggalan;
3. Industri pengolahan;
4. Pengadaan listrik dan gas;
5. Pengadaan air;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
8. Transportasi dan pergudangan;
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
10. Informasi dan komunikasi;
11. Jasa keuangan;
12. Real estat;
13. Jasa perusahaan;
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
15. Jasa pendidikan;
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
17. Jasa lainnya.

PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Sedangkan PDRB dengan pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) pengeluaran konsumsi pemerintah, (3)

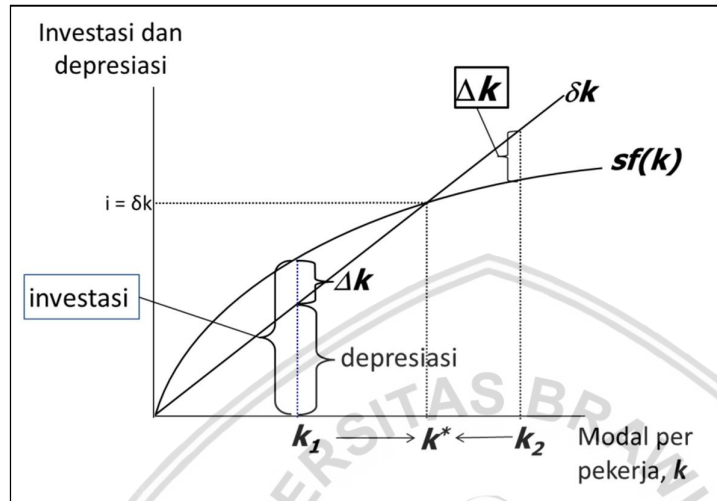
pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor netto (ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi (BPS, 2017).

Salah satu akar dari teori pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah model pertumbuhan Solow. Model ini menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat *output* perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu (Mankiw, 2007). Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan merupakan komponen utama dalam pembentukan modal pada kondisi perekonomian yang mapan. Tingkat tabungan yang tinggi akan memberikan persediaan modal yang besar bagi perekonomian sehingga dapat mendorong tingkat *output* yang tinggi pula. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki sedikit persediaan modal sehingga tingkat *output* dalam perekonomian pun menjadi kecil.

Dalam jangka panjang, perekonomian akan menuju pada ekuilibrium perekonomian jangka panjang yang disebut kondisi mapan (*steady state*). Kondisi mapan k^* tercapai saat perubahan persediaan modal Δk mencapai titik keseimbangan ($\Delta k = 0$), yang terjadi ketika investasi $sf(k)$ sama dengan depresiasi δk . Apabila investasi melebihi depresiasi, terdapat tambahan modal per pekerja sebesar Δk sehingga persediaan modal akan tumbuh sehingga menggeser kondisi k_1 menuju kondisi mapan k^* . Begitu pula sebaliknya saat depresiasi melebihi investasi, persediaan modal dari k_2 akan menyusut hingga dalam jangka panjang berada dalam titik keseimbangan pada kondisi mapan k^* . Tabungan yang lebih tinggi akan mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat, tetapi hanya sementara sampai perekonomian mencapai titik keseimbangan

baru. Gambar 2.2 menyajikan hubungan antara investasi, depresiasi, dan modal per pekerja sebagai pembentuk kondisi mapan.

Gambar 2.2 : **Investasi, Depresiasi, dan Kondisi Mapan**



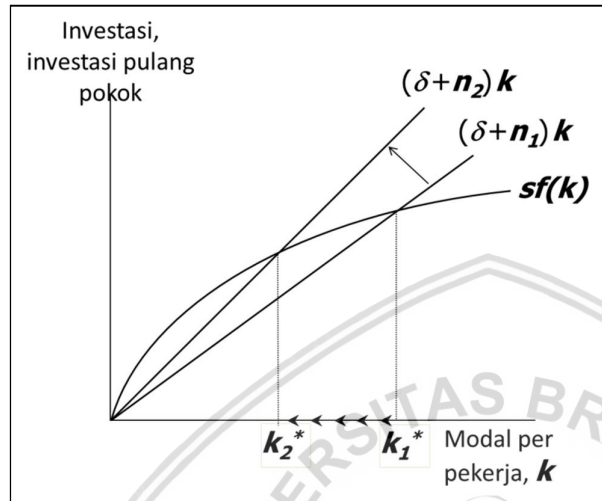
Sumber: Mankiw, 2007

Faktor kedua dalam Model Solow adalah pertumbuhan populasi. Seperti halnya depresiasi, populasi adalah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja mengecil. Jika n adalah tingkat pertumbuhan populasi dan δ adalah tingkat depresiasi, maka $(\delta+n)k$ adalah investasi pulang pokok, yaitu jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja k tetap konstan. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam kondisi mapan, jumlah investasi $sf(k)$ yang dibutuhkan harus dapat mengimbangi pengaruh depresiasi dan pertumbuhan populasi.

Model Solow memprediksi bahwa pertumbuhan populasi akan mengurangi tingkat modal per pekerja sehingga berdampak pada penurunan jumlah pendapatan yang diterima para pekerja. Sebagaimana ilustrasi pada gambar 2.3, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari n_1 ke n_2 menggeser garis investasi pulang pokok ke atas, sehingga menurunkan persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan dari k_1^* menjadi k_2^* . Kondisi mapan yang baru

memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah daripada kondisi mapan awal.

Gambar 2.3 : Dampak pertumbuhan populasi



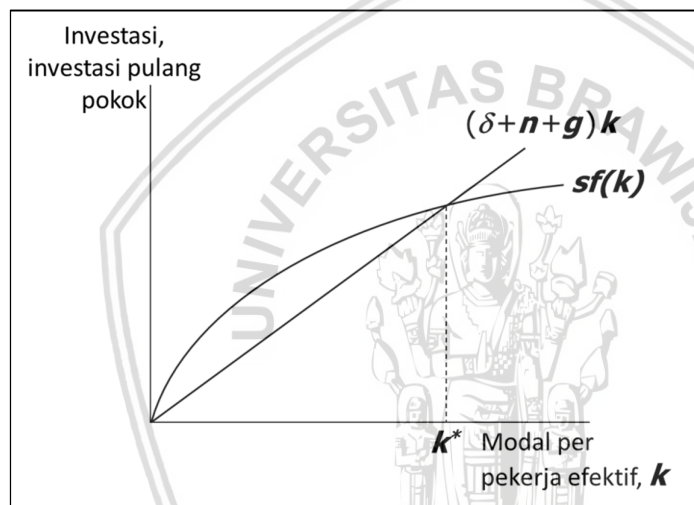
Sumber: Mankiw, 2007

Teknologi menjadi variabel terakhir yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam Model Solow. Kemajuan teknologi dalam Model Solow merupakan variabel eksogen yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi. Kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Kemajuan teknologi akan mengarahkan perekonomian ke pertumbuhan yang berkelanjutan. Apabila perekonomian sudah berada dalam kondisi mapan, hanya kemajuan teknologi yang bisa menjelaskan peningkatan standar kehidupan yang berkelanjutan.

Kemajuan teknologi akan menambah efisiensi tenaga kerja sehingga memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi (Mankiw, 2007). Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja aktual meningkat, namun setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Dengan g sebagai notasi tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja,

maka investasi pulang pokok menjadi $(\delta + n + g)k$. Untuk menjaga k tetap konstan, δk dibutuhkan untuk mengganti modal yang terdepresiasi, nk dibutuhkan untuk memberi modal bagi para pekerja baru, dan gk dibutuhkan untuk memberi modal “para pekerja efektif” baru yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Sebagaimana ditampilkan dalam gambar 2.4, dalam kondisi mapan k^* , investasi $sf(k)$ harus disesuaikan secara tepat untuk mengimbangi penurunan k yang terkait dengan depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi.

Gambar 2.4 : **Kemajuan teknologi dan model pertumbuhan Solow**



Sumber: Mankiw, 2007

2.1.4 Ketimpangan Pendapatan dan Teori Ekonomi Regional

Tingkat ketimpangan pendapatan dapat mencerminkan ukuran pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, atau pendapatan per kapita tidak dapat menggambarkan kesejahteraan riil dari masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah. Pemerataan ekonomi dapat tercapai dalam kondisi hasil dari pembangunan ekonomi terdistribusi secara merata dan adil.

Profesor Gunnar Myrdal melalui Teori Penyebab Kumulatif (*Cumulative Causation Theory*) berpendapat bahwa sebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya dampak balik (*backwash effects*) dan lemahnya dampak sebar (*spread effects*). Dampak balik adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu, yang meliputi dampak migrasi, perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab musabab sirkuler antara faktor-faktor baik nonekonomi maupun ekonomi. Sedangkan dampak sebar merupakan dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya (Jhingan, 2016).

Ketimpangan regional berakar pada motif laba yang mendorong perkembangan pembangunan terpusat pada wilayah yang memiliki harapan laba tinggi. Pasar bebas akan membuat kegiatan ekonomi berkecenderungan untuk mendatangkan keuntungan sehingga akan mengelompok pada daerah atau wilayah tertentu dan meninggalkan daerah lain tetap terbelakang. Kekuatan pasar tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan, bahkan akan terus mendorong ketimpangan regional.

Dampak balik dari migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan membuat ketimpangan semakin lebar. Daerah dan wilayah perkembangan perekonomian akan menarik orang muda dan aktif dari daerah lain sehingga cenderung akan menguntungkan wilayah berkembang tersebut dan menghambat kegiatan ekonomi daerah asal migran. Perpindahan modal juga turut mendorong ketimpangan regional. Perekonomian daerah maju akan menyedot investasi dari daerah lain sehingga menimbulkan kelangkaan modal di daerah lain. Bahkan menurut Myrdal, sistem perbankan, jika tidak diatur untuk bertindak lain, cenderung menjadi alat penyedot tabungan dari wilayah yang lebih miskin ke

wilayah yang lebih kaya dan maju yang hasil perputaran modalnya tinggi dan aman. Demikian pula dengan industri dan perdagangan yang cenderung menguntungkan wilayah maju dan menghambat atau bahkan menghancurkan industri di wilayah tertinggal.

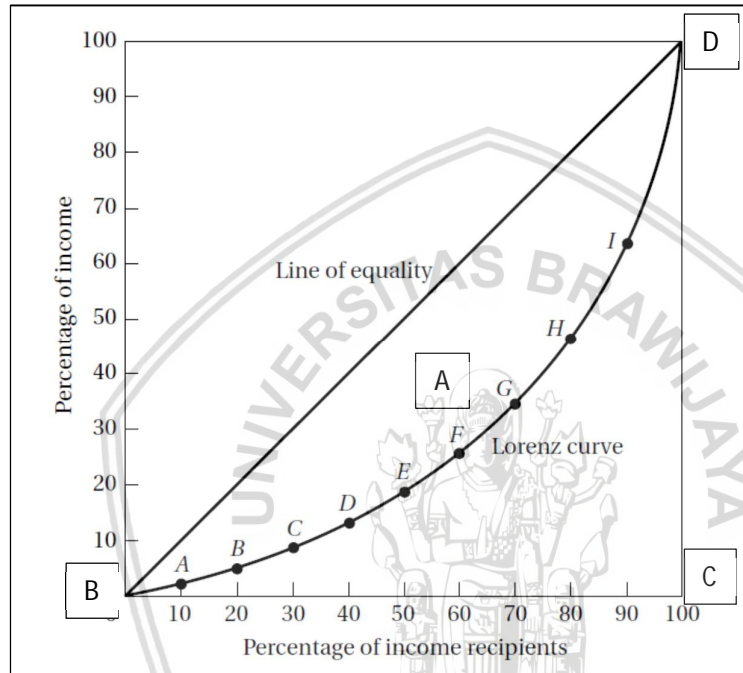
Selain dampak balik, dalam perekonomian regional terdapat dampak sebar yang akan memberikan keuntungan kepada daerah sekitar dari peningkatan pasar produk pertanian yang memproduksi bahan baku untuk keperluan industri. Akan tetapi dampak balik dan dampak sebar tidak mungkin berjalan seimbang. Profesor Myrdal mengutip Kajian Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa yang menyimpulkan bahwa ketimpangan regional jauh lebih besar di negara miskin ketimbang di negara kaya, dengan kecenderungan ketimpangan regional semakin meningkat di negara miskin sedangkan di negara kaya semakin menyempit. Dari fenomena tersebut Profesor Myrdal menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi akan membuat semakin kuat pula dampak sebar. Selain itu, intervensi dan peran pemerintah sangat penting untuk mengimbangi dampak balik yang ditimbulkan pasar bebas dalam rangka menanggulangi ketimpangan regional dan menciptakan pemerataan ekonomi.

Variabel yang sering digunakan untuk mengukur pemerataan ekonomi salah satunya adalah variabel pendapatan. Distribusi pendapatan dapat digunakan untuk menggambarkan apakah output dari perekonomian sudah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari distribusi pendapatan tersebut dapat diteliti bagaimana tingkat sebaran pendapatan dalam suatu wilayah. Sebaran atau distribusi pendapatan yang tidak merata dalam masyarakat tersebut mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Kurva Lorenz sering kali menjadi alat pengukuran ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase

dari total pendapatan diterima dalam satu periode tertentu (Todaro, 2012). Semakin jauh Kurva Lorenz dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna) maka semakin lebar tingkat ketimpangan pendapatan. Bentuk dari Kurva Lorez sebagaimana tergambar dalam gambar 2.5.

Gambar 2.5 : **Kurva Lorenz**



Sumber: Todaro, 2012

Selanjutnya untuk menghitung tingkat ketimpangan suatu wilayah dapat diperoleh dengan menghitung rasio area antara garis diagonal dan Kurva Lorenz (area A yang diarsir) yang dibagi dengan luas setengah persegi dimana Kurva Lorenz berada (area segitiga BCD). Rasio inilah yang disebut dengan indeks gini. Nilai indeks gini yang dihasilkan berkisar antara 0 yang mencerminkan pemerataan sempurna dan 1 yang mencerminkan ketidakmerataan sempurna. Semakin tinggi nilai indeks gini semakin lebar pula ketimpangan pendapatan, sebaliknya semakin rendah nilai indeks gini mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Menurut Latumaerissa (2015), ketimpangan dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu tingkat ketimpangan rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat ketimpangan rendah terjadi apabila nilai indeks gini kurang dari 0,4. Sedangkan ketimpangan tinggi terjadi apabila nilai indeks gini lebih dari 0,5. Diantara keduanya yaitu nilai indeks gini antara 0,4 sampai dengan 0,5 merupakan tingkat ketimpangan sedang. Sedangkan Bank Dunia mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan melihat dari besarnya kontribusi (sumbangan) dari 40% penduduk termiskin terhadap keseluruhan pendapatan nasional. Kriteria yang dipakai Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- a. Ketimpangan Parah= 40 % penduduk yang berpendapatan rendah menikmati < 12 % pendapatan nasional.
- b. Ketimpangan Sedang= 40 % penduduk yang berpendapatan rendah menikmati 12 - 17 % pendapatan nasional.
- c. Ketimpangan Lunak= 40 % penduduk yang berpendapatan rendah menikmati > 17 % pendapatan nasional.

2.1.5 Hubungan Antara Belanja Modal Dengan Ketimpangan Pendapatan

Belanja modal pemerintah merupakan pembelian sebagian *output* perekonomian. Pembelian tersebut menjadikan belanja modal sebagai konsumsi pemerintah yang mencerminkan permintaan atas barang modal. Selanjutnya permintaan dalam perekonomian direspon oleh produsen dengan memproduksi barang modal yang diinginkan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan dapat pula memberikan upah bagi para pekerja. Pengadaan belanja modal yang bersifat padat karya misalnya pembangunan infrastruktur publik akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga memberikan penghasilan bagi para pekerja.

Belanja modal juga merupakan investasi pemerintah karena barang yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Apabila barang modal tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, maka belanja modal secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dalam jangka panjang pula. Sedangkan untuk *output* belanja modal dalam bentuk barang publik dapat digunakan untuk mendorong efisiensi produktivitas, perdagangan, dan memperlancar akses pemerataan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan akan mendorong perekonomian ke arah penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat memberikan penghasilan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka ketimpangan pendapatan juga akan turun.

Dalam model pertumbuhan endogen yang dikembangkan Barro (1990), pengeluaran pemerintah produktif mempengaruhi pertumbuhan secara endogen melalui pertumbuhan cadangan modal swasta dan publik (Utama, 2017). Barro membuat simulasi dengan memasukkan variabel pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak, dan hasilnya pengeluaran pemerintah tersebut akan menambah akumulasi modal sektor swasta.

Dalam membangun modelnya, Barro mempertimbangkan dua hal. Pertama, ada tidaknya hubungan antara barang jasa yang dibeli dengan kepemilikan modal. Asumsinya pemerintah membeli barang jadi dari sektor swasta sehingga pendapatan nasional meningkat. Seandainya asumsi ini tidak dapat terpenuhi, dan pemerintah menyediakan kebutuhannya sendiri, selama pemerintah melakukan proses produksinya seperti swasta dan membeli *input* dari swasta maka dampaknya sama. Kedua, penyediaan barang publik oleh pemerintah secara tidak langsung dapat menambah akumulasi modal sektor swasta. Beberapa barang atau jasa diperlukan dalam proses produksi tetapi

karena sifatnya yang *nonrivalry* maka pihak swasta enggan untuk membuatnya, sehingga pemerintah perlu membuatnya (Utama, 2017).

2.1.6 Hubungan Antara PDRB Dengan Ketimpangan Pendapatan

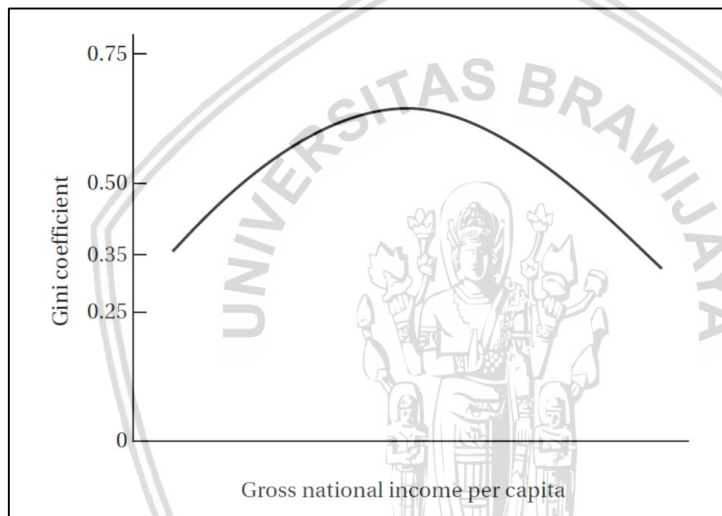
PDRB merupakan indikator penting dalam menghitung kinerja perekonomian suatu daerah. Salah satu kegunaan PDRB adalah untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu yang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh sebab itu maka dalam hubungan antara PDRB dengan ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan melalui variabel pertumbuhan ekonomi yang mewakili pertumbuhan PDRB suatu wilayah.

Menurut Kuznets dalam Todaro (2012), pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk dan akan membaik pada tahapan selanjutnya. Fenomena tersebut digambarkan dengan Kurva “U-terbalik” Kuznets sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.6. Koefisien Gini akan terlihat seperti sebuah kurva yang berbentuk “U Terbalik” seiring dengan naiknya pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dalam pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Menurut Kuznets ketimpangan akan semakin parah pada tahapan awal pertumbuhan ekonomi karena adanya perubahan struktural dimana pada tahap awal pertumbuhan ekonomi dikonsentrasikan pada sektor industri modern yang kesempatan kerjanya terbatas tetapi memiliki tingkat upah dan produktivitas yang tinggi.

Ketimpangan pendapatan akan terus memburuk seiring pergeseran perekonomian dari sektor tradisional menuju sektor industri modern. Setelah mencapai titik tertentu maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan searah dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Titik balik ini dapat terjadi ketika sektor industri di daerah perkotaan sudah mampu menyerap sebagian besar

tenaga kerja dari sektor pertanian atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. Secara tidak langsung Kuznets menganggap bahwa pemerintah seharusnya lebih terfokus pada kebijakan pertumbuhan ekonomi karena ketimpangan pendapatan pada akhirnya tidak dapat dihindari akan naik sampai pada titik tertentu dan kemudian akan turun dengan sendirinya sehingga tidak memerlukan peran pemerintah dalam pemerataan pendapatan.

Gambar 2.6 : Kurva “U Terbalik” Kuznets



Sumber : Todaro, 2012

Okun (1975) menyimpulkan bahwa terdapat *tradeoff* antara ketimpangan dengan efisiensi. Efisiensi yang dimaksud disini adalah efisiensi pasar yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. *Tradeoff* tersebut artinya bahwa efisiensi dan pemerataan tidak dapat berjalan beriringan. Peningkatan pada efisiensi akan memperbesar ketimpangan pendapatan, dan pengurangan ketimpangan akan mengorbankan efisiensi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga usaha untuk mengurangi ketimpangan dianggap sebagai kebijakan yang berlawanan dengan usaha untuk mencapai efisiensi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi hasil pengujian antara belanja modal dengan ketimpangan pendapatan. Lopez (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Pro-growth, pro-poor : Is there a trade-off?* mengemukakan bahwa infrastruktur publik merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan sekaligus menurunkan ketimpangan. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Turnovsky (2015) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa belanja pemerintah untuk modal publik akan meningkatkan ketimpangan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Investasi pemerintah tersebut cenderung meningkatkan produktivitas modal swasta yang pada akhirnya terjadi ketimpangan distribusi hasil yang tidak merata antara pemilik dengan para buruh.

Hur (2014) dalam tulisannya berjudul *Government Spending and Inclusive Growth in Developing Asia* menyatakan bahwa pengeluaran belanja modal berpengaruh positif terhadap ketimpangan, sehingga diperlukan belanja lain seperti belanja kesehatan dan pendidikan yang cukup untuk mengurangi ketimpangan. Hasil penelitian yang sama diperoleh oleh Sabir (2015) dengan studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya bahwa peningkatan belanja modal dalam APBD akan meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja modal lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di daerah perkotaan dibandingkan alokasi di wilayah pedesaan.

Sementara Utama (2017) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah yang meliputi belanja infrastruktur, belanja kesehatan, realisasi anggaran pendidikan, subsidi dan transfer pemerintah tidak mempengaruhi tingkat ketimpangan di Indonesia. Faktor anggaran yang kecil dan pemerataan sebaran menjadi

permasalahan. Kondisi infrastruktur yang tertinggal dan terkonsentrasi khususnya di Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi, menyebabkan belanja infrastruktur tidak signifikan mengurangi ketimpangan.

Rubin (2015) meneliti hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan di AS, dan mendapati hasil bahwa pertumbuhan berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Kesimpulan tersebut kurang lebih sama dengan teori yang dikemukakan oleh Okun (1975) bahwa terdapat *tradeoff* antara ketimpangan dengan efisiensi. Sementara pengaruh ketimpangan terhadap pertumbuhan dikemukakan oleh Shin (2012). Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa ketimpangan dapat menghambat pertumbuhan pada tahap awal pembangunan ekonomi, dan dapat mendorong pertumbuhan saat mendekati kondisi mapan. Ketidaksetaraan pendapatan dapat dikurangi dengan pajak penghasilan yang lebih tinggi dalam keadaan stabil, namun tidak dapat dikurangi pada tahap awal pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang rendah dapat dicapai bersamaan dengan pajak penghasilan rendah pada tahap awal pembangunan ekonomi, namun keduanya tidak dapat dicapai secara simultan dalam kondisi mapan.

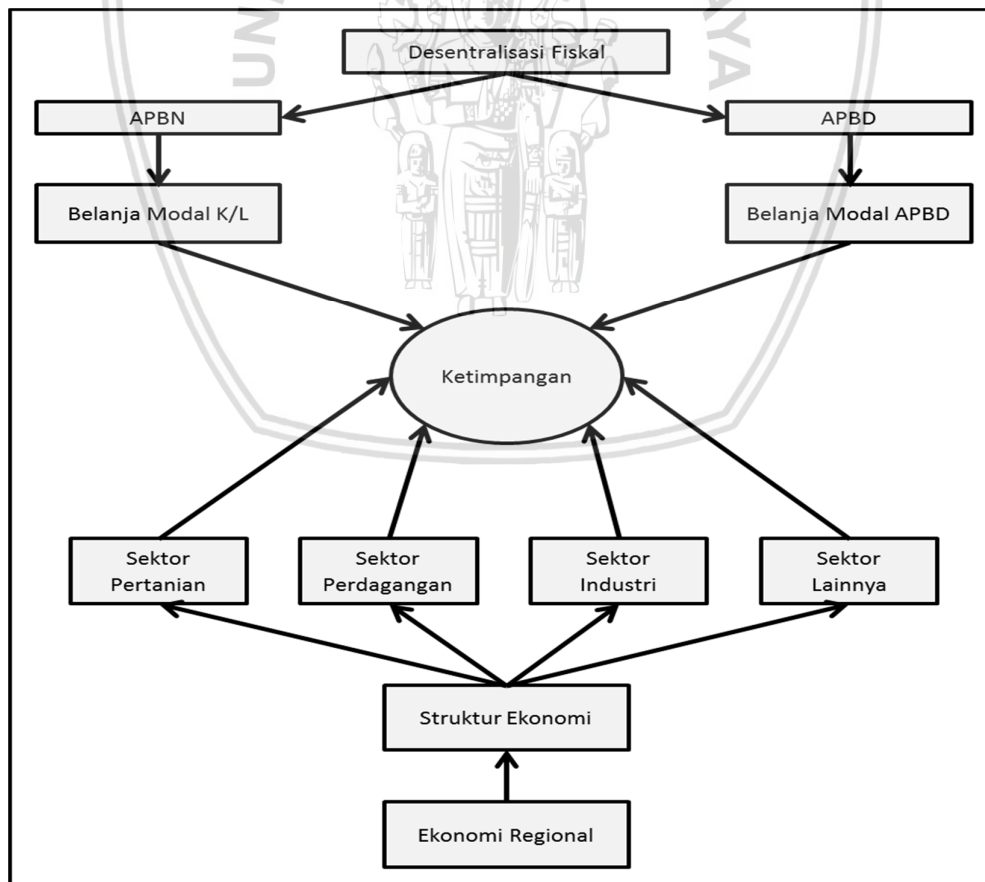
Untuk mengetahui dampak peningkatan produktivitas di bidang pertanian, industri, dan layanan terhadap kemiskinan, Ivanic (2017) melakukan penelitian pada 140 wilayah dan 57 sektor perdagangan dunia, termasuk perdagangan, produksi, dan konsumsi untuk rumah tangga pribadi, pemerintah dan perusahaan. Dalam kesimpulannya didapatkan bahwa di negara-negara miskin, peningkatan produktivitas pertanian pada umumnya memiliki dampak pengurangan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan peningkatan pada sektor industri atau jasa. Tingkat pengurangan kemiskinan menurun seiring dengan kenaikan pendapatan rata-rata, sebagian karena sektor pertanian menjadi lebih kecil sebagai bagian dari ekonomi, dan sebagian karena

pertumbuhan produktivitas pertanian menjadi kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambaran kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 2.7. Desentralisasi fiskal menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam menjalankan keuangannya. Keuangan pemerintah daerah dituangkan dalam dokumen APBD yang penggunaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Jadi dalam pemerintahan di Indonesia terdapat dua struktur utama pemerintah beserta keuangannya, yaitu pemerintah pusat dengan APBN dan pemerintah daerah dengan APBD.

Gambar 2.7 : Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2018

Dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah menggunakan instrumen belanja yang tertuang dalam APBN dan APBD untuk mendanai semua kegiatannya. Sebagian dari belanja pemerintah tersebut dialokasikan dalam pos belanja modal. Belanja modal pemerintah merupakan permintaan atas output perekonomian dalam rangka pembentukan aset yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Oleh karena itu belanja modal menjadi investasi pemerintah pada sektor publik yang sangat penting untuk mendorong perekonomian dan pemerataan pendapatan karena dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Belanja modal pemerintah juga memiliki efek pengganda dalam menggerakkan roda perekonomian. Belanja pemerintah, termasuk belanja modal pemerintah, akan menjadi pendapatan bagi penyedia barang dan jasa, yang selanjutnya akan digunakan untuk konsumsi pada tingkat kedua. Konsumsi tersebut menjadi pendapatan bagi penyedia barang dan jasa pada tingkat kedua dan sebagian akan dikeluarkan lagi sebagai konsumsi pada tingkat ketiga, sehingga menjadi pendapatan bagi penyedia barang dan jasa pada tingkat ketiga, dan seterusnya dengan proses yang berulang-ulang, sehingga memberikan efek pengganda dalam perekonomian. Dan pada akhirnya belanja pemerintah tersebut akan turut meningkatkan PDB secara keseluruhan, atau peningkatan pada PDRB dalam lingkup daerah. Peningkatan dalam perekonomian tersebut dapat mempengaruhi distribusi pendapatan sehingga akhirnya akan berpengaruh pada tingkat pemerataan pendapatan.

Sementara itu, perkembangan perekonomian regional diantaranya akan menimbulkan pergeseran struktur perekonomian dan juga perpindahan tenaga kerja. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian akan bergeser dari sektor tradisional seperti sektor pertanian menuju sektor modern seperti sektor industri, yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Pergeseran ini akan mempengaruhi komposisi dan sumbangan PDRB menurut lapangan usaha. Sektor usaha modern akan memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada sektor perekonomian tradisional sehingga akan menimbulkan ketimpangan pendapatan antar sektor. Hasil dari masing-masing sektor dengan karakteristiknya masing-masing dapat mempengaruhi pergerakan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka peneliti menggunakan variabel bebas antara lain variabel rasio belanja modal K/L di Jawa Timur yang dananya bersumber dari APBN, dan variabel rasio belanja modal APBD yang merupakan belanja modal pemerintah daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur. Peneliti menambahkan beberapa variabel kontrol antara lain rasio PDRB sektor pertanian, rasio PDRB sektor industri, dan rasio PDRB sektor perdagangan dimana ketiganya merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Jawa Timur. Keseluruhan variabel di atas diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk menjawab tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Diduga belanja modal K/L berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan;
2. Diduga belanja modal APBD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang menitikberatkan kepada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data untuk kemudian diolah, dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan apakah hipotesis yang dibangun terbukti atau tidak. Analisis kuantitatif ini didasarkan pada analisis dan pengujian variabel-variabel yang dapat dijelaskan secara terukur dengan menggunakan alat analisis yang pasti.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Alasan yang mendasari dipilihnya Provinsi Jawa Timur yaitu karena Jawa Timur merupakan salah satu pilar pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang memiliki laju tingkat ketimpangan sangat tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Alasan lainnya adalah kondisi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sangat beragam sehingga masing-masing wilayah mempunyai dinamika pembangunan dan ekonomi yang kompetitif, disamping keragaman geografis wilayah dan kemudahan dalam menjangkau akses informasi publik. Waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2015. Sedangkan wilayah penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 : **Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional
Rasio Belanja Modal Kementerian/ Lembaga terhadap PDRB (RBMKL)	Perbandingan antara realisasi anggaran belanja modal instansi vertikal Kementerian/Lembaga dalam suatu kabupaten/kota yang dibiayai dengan APBN dengan total PDRB dalam lingkup Provinsi Jawa Timur.
Rasio Belanja Modal APBD terhadap PDRB (RBMAPBD)	Perbandingan antara realisasi anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibiayai dengan APBD dengan total PDRB dalam lingkup Provinsi Jawa Timur.
Rasio PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB (RPDRBTAN)	Perbandingan antara PDRB sektor pertanian dengan total PDRB pada tahun dan daerah tertentu. PDRB sektor pertanian adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi sektor pertanian dalam satu wilayah kabupaten/kota yang dihitung atas dasar harga berlaku.
Rasio PDRB Sektor Industri terhadap PDRB (RPDRBIND)	Perbandingan antara PDRB sektor industri dengan total PDRB pada tahun dan daerah tertentu. PDRB sektor industri adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi sektor industri dalam satu wilayah kabupaten/kota yang dihitung atas dasar harga berlaku.
Rasio PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB (RPDRBDAG)	Perbandingan antara PDRB sektor perdagangan dengan total PDRB pada tahun dan daerah tertentu. PDRB sektor perdagangan adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi sektor perdagangan dalam satu wilayah kabupaten/kota yang dihitung atas dasar harga berlaku.
Ketimpangan Pendapatan (GINI)	Besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat dalam satu daerah yang dihitung dalam satuan indeks gini.

Sumber: Penulis, 2018

3.4 Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh instansi pemerintah baik satuan kerja Kementerian/Lembaga pemerintah pusat maupun satuan kerja pemerintah daerah yang ada dalam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki realisasi anggaran belanja yang dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data yang digunakan berupa data panel yaitu gabungan antara data *cross-section* dan data *time-series*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb), publikasi data keuangan daerah dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), dan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim).

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio belanja modal K/L, rasio belanja modal APBD, rasio PDRB sektor pertanian, rasio PDRB sektor industri, dan rasio PDRB sektor perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penggunaan metode analisis data panel karena data yang dianalisis merupakan gabungan antara data antar waktu (*time series*) dan data antar individu (*cross-section*). Pengujian data dilakukan dengan menggunakan aplikasi EViews 9.

3.6.1 Spesifikasi Model

Model atau fungsi yang akan digunakan adalah:

Ketimpangan pendapatan = f (rasio belanja modal K/L, rasio belanja modal APBD, rasio PDRB sektor pertanian, rasio PDRB sektor industri, rasio PDRB sektor perdagangan)

Model di atas dituangkan dalam persamaan:

$$\text{GINI}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{RBMKL}_{it} + \beta_2 \text{RBMAPBD}_{it} + \beta_3 \text{RPDRBTAN}_{it} + \beta_4 \text{RPDRBIND}_{it} + \beta_5 \text{RPDRBDAG}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:	Gini	= ketimpangan pendapatan penduduk
	RBMKL	= rasio belanja modal kementerian/lembaga
	RBMAPBD	= rasio belanja modal APBD
	RPDRBTAN	= rasio PRDB pertanian
	RPDRBIND	= rasio PDRB industri
	RPDRBDAG	= rasio PDRB perdagangan
	α	= konstanta
	β	= koefisien regresi masing-masing variabel
	ε	= eror

3.6.2 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel

Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan berikut ini.

a. *Common Effect Model*

Pendekatan ini merupakan model data panel yang paling sederhana. Teknik ini melihat data *cross section* serta *time series* sebagai satu kesatuan dengan mengabaikan adanya perbedaan waktu dan individu. Dengan hanya menggabungkan data *time-series* dan *cross-section*, diasumsikan bahwa perilaku data antar individu selalu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS).

b. Fixed Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Data panel diestimasi dengan *slope* yang tidak berubah seiring waktu dari setiap subjek namun intersep antar individu berbeda karena adanya perbedaan karakteristik perbedaan antar individu (Gujarati, 2012). *Fixed Effect Model* menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar data. Metode estimasi ini dikenal pula dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV).

c. Random Effect Model

Model ini akan mengestimasi data panel dimana ada kemungkinan variabel pengganggu saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing. Keuntungan menggunakan model *random effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas.

3.6.3 Pemilihan Spesifikasi Model Terbaik

Untuk memilih salah satu model estimasi yang dianggap paling tepat dari tiga jenis model data panel maka perlu dilakukan serangkaian uji sebagai berikut.

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui pilihan model terbaik antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Hipotesis dalam uji Chow adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Untuk mengetahui apakah menerima H_0 atau H_1 , maka perlu memperhatikan *F Restricted*, yaitu dengan melihat *p-value F* hasil regresi dengan

menggunakan model *Fixed Effects*. H_0 ditolak apabila *P-value F* dihasilkan lebih kecil dari α 5%. Sebaliknya, H_0 akan diterima apabila *P-value F* > dari nilai α 5%.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui pilihan model terbaik antara *Random Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman test adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Untuk mengetahui apakah keputusannya menerima H_0 atau H_1 , maka cara yang digunakan adalah dengan melihat *Prob.chi²* pada hasil uji Hausman. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa $(\text{Prob.chi}^2) < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan sebaliknya jika $(\text{Prob.chi}^2) > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dalam pengujian ini nilai α yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji model regresi apakah *error term* atau residualnya terdistribusi secara normal atau tidak. Model yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji apakah residual terdistribusi normal atau tidak, terdapat dua cara yang dapat dilakukan yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dilakukan dengan menggunakan grafik histogram. Normalitas dapat dideteksi dengan cara melihat persebaran data pada sumbu diagonal atau dengan mengamati histogram residualnya. Jika data tersebar pada sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garisnya atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang normal, model regresi tersebut memenuhi

asumsi normalitas. Untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas, tidak cukup memadai apabila hanya menggunakan analisis grafik. Hal ini dikarenakan hasil analisis dengan menggunakan grafik tersebut dapat menyesatkan apabila tidak berhati-hati yaitu data yang terlihat normal namun ternyata memiliki hasil yang sebaliknya. Uji normalitas dapat menggunakan metode *Jarque Bera* (JB) dengan melihat nilai JB.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi variabel bebas yang berkorelasi dengan satu atau dapat pula lebih variabel bebas lainnya. Konsekuensi dari model regresi yang terdapat Multikolinearitas adalah kesalahan standar estimasinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah variabel eksogen. Dalam pengujian ini akan digunakan suatu matriks korelasi yang menunjukkan koefisien suatu korelasi antar variabel sebagai pembentuk model. Masalah Multikolinearitas terjadi apabila dalam matriks korelasi antar variabel mempunyai nilai lebih dari 0.8

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini menyatakan bahwa asumsi populasi variabel endogen mempunyai hubungan dengan berbagai variabel eksogennya, mempunyai varian sama. Akibat pelanggaran uji ini adalah menyebabkan tidak minimalnya varian estimasi koefisien regresi. Suatu pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji White. Hipotesis yang akan diuji adalah:

$H_0 : \gamma = 0$, berarti tidak terdapat Heteroskedastisitas

$H_1 : \gamma \neq 0$, terdapat adanya Heteroskedastisitas

Wilayah penolakan H_0 adalah probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-squared} < \alpha$, sedangkan penerimaan H_0 adalah nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-squared} > \alpha$. Jika H_0 ditolak maka varians dari variabel gangguan untuk tiap pengamatan bersifat berbeda untuk tiap variabel bebasnya, sebaliknya apabila H_0 diterima maka varians variabel

gangguan untuk setiap nilai pengamatan adalah sama untuk seluruh variabel independen.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara variabel gangguan pada periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Pengujian terhadap autokorelasi dilakukan untuk melihat apabila terdapat suatu korelasi antar sampel yang diurut berdasarkan atas waktu (*data time series*) atau dalam data *cross-section* menurut urutan tempat/ruang. Autokorelasi juga menunjukkan ketidakbebasan sifat residual regresi dari satu observasi ke observasi lainnya. Fenomena ini umum ditemukan pada regresi dengan data yang bersifat *time series*, tetapi kadang juga ditemukan data *cross section*. Mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Apabila DW terletak diantara d_U dan $4-d_U$ maka tidak ada autokorelasi.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya variasi perubahan variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independen. Semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen, maka nilai R^2 akan semakin besar. Nilai koefisien determinasi ini terletak diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana semakin tinggi nilai R^2 suatu regresi (mendekati 1), maka hasil regresi tersebut akan semakin baik.

b. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji Statistik F)

Uji F ini dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara sekaligus tanpa memperhatikan tingkat pengaruh dari setiap variabel. Uji F memberikan hasil

yang signifikan meskipun hanya terdapat satu atau dua variabel independen yang berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji F adalah dengan membandingkan *p-value* ($\text{Prob} > \chi^2$) dengan alpha. Alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila *p-value* ($\text{Prob} > \chi^2$) $< \alpha = 5\%$ maka variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kebalikannya, jika *p-value* ($\text{Prob} > \chi^2$) $\geq \alpha = 5\%$ maka dinyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam persamaan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam melakukan uji t ini dapat dilakukan dengan cara melihat *p-value* ($P > |z|$) dari masing-masing variabel independen. Apabila *p-value* ($P > |z|$) masing-masing variabel independen lebih kecil dibandingkan dengan alpha (*p-value* ($P > |z|$) $< \alpha = 5\%$) maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, apabila *p-value* ($P > |z|$) masing-masing variabel independen lebih besar sama dengan alpha (*p-value* ($P > |z|$) $\geq \alpha = 5\%$) maka berarti bahwa masing-masing variabel independen terkait tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kinerja Makro Ekonomi Jawa Timur

Kinerja makro ekonomi daerah merupakan hasil yang dicapai dari pengelolaan dan manajemen sumberdaya pembangunan yang dimiliki masing-masing daerah bersangkutan (Sabir, 2015). Oleh karena itu hasil kinerja makro ekonomi daerah dapat berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain tergantung pada sumber daya dan pengelolaannya. Kinerja makro ekonomi daerah tersebut diantaranya tercermin dalam PDRB, stuktur ekonomi dan pendapatan perkapita.

4.1.1 PDRB Jawa Timur

PDRB merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja makro ekonomi daerah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2016, perekonomian Jawa Timur selalu memberikan sumbangan lebih dari 14% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. PDRB Jawa Timur pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 14,65 persen terhadap perekonomian nasional, yang mana angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 dimana Jawa Timur menyumbang kontribusi sebesar 14,53 persen terhadap perekonomian nasional. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung melambat dari yang semula 6,44% di tahun 2011 menjadi 5,45% pada tahun 2016. Tabel 4.1 menggambarkan pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa dengan tahun dasar 2010 dan kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian nasional.

Tabel 4.1 : Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa dan Kontribusi Provinsi Jawa Timur Terhadap Perekonomian Nasional (dalam persen)

Provinsi	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	6.73	6.53	6.07	5.91	5.91	5.88	6.22
Jawa Barat	6.5	6.5	6.33	5.09	5.05	5.66	5.29
Jawa Tengah	5.3	5.34	5.11	5.27	5.47	5.27	5.27
DI Yogyakarta	5.21	5.37	5.47	5.17	4.95	5.05	5.26
Jawa Timur	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44	5.57	5.45
Banten	7.03	6.83	6.67	5.51	5.45	5.28	5.71
Nasional	6,35	6,23	5,78	5,02	4,79	5,02	5,07
Kontribusi Jawa Timur	14.32	14.4	14.39	14.4	14.53	14.65	14.61

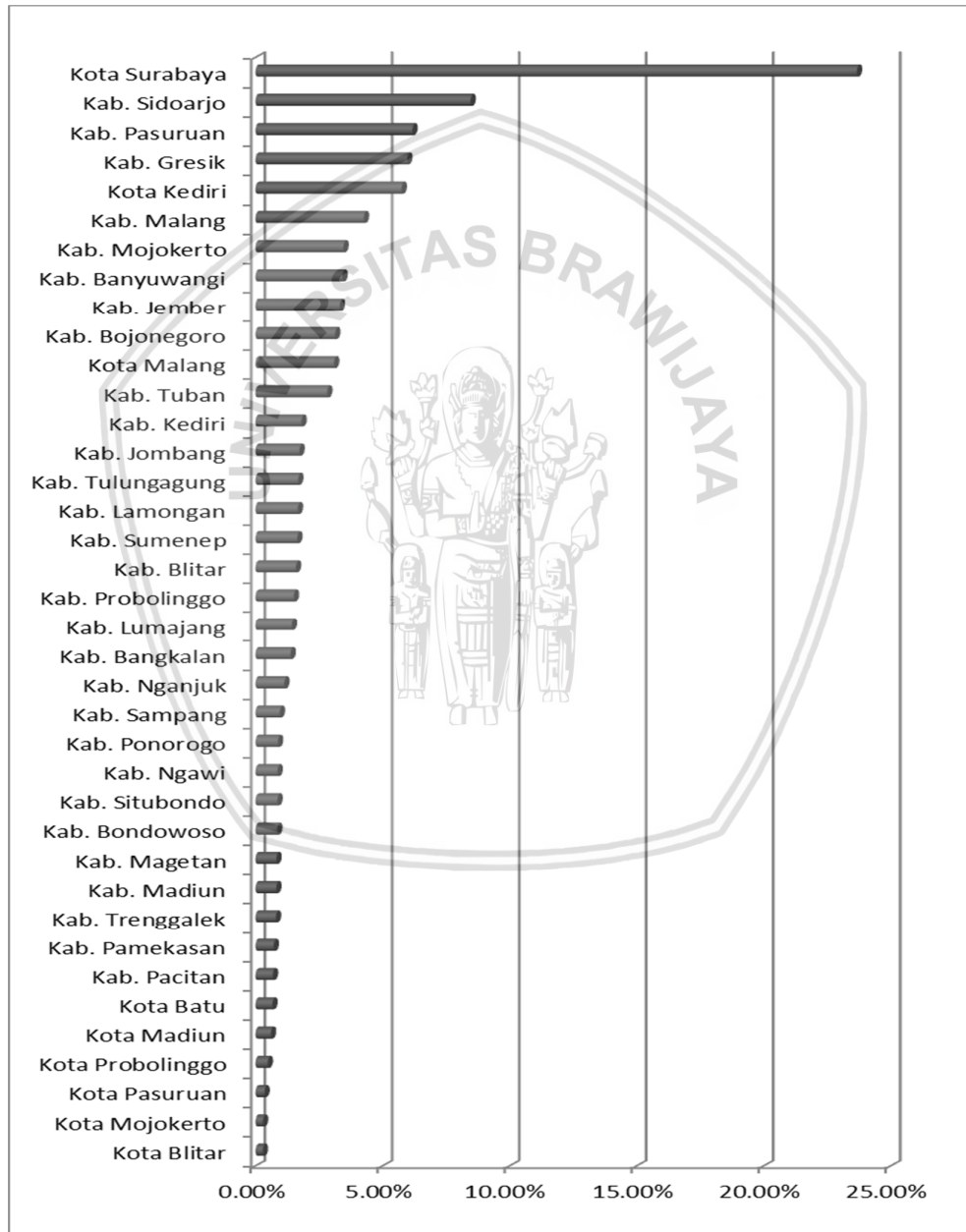
Sumber: Data Diolah BPS, 2018

Perkembangan PDRB menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi dan kinerja pembangunan perekonomian suatu daerah. Untuk melihat perkembangan struktur perekonomian dan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB). Secara umum perkembangan nilai PDRB ADHB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2010-2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rata-rata distribusi PDRB kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 4.1.

Komposisi Kabupaten/Kota penyumbang PDRB di Jawa Timur dari tahun ke tahun relatif tidak banyak berubah. Kota Surabaya menjadi penyumbang terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 23,67%. Di posisi kedua ada Kabupaten Sidoarjo dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,46%, disusul kemudian oleh Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Mojokerto. Keseluruhan daerah tersebut merupakan daerah basis industri di Jawa Timur. Sedangkan daerah dengan kontribusi PDRB terendah ditempati daerah perkotaan selain Kota Kediri

dan Kota Surabaya, antara lain terdapat Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Batu yang menjadi tujuan perdagangan berbagai komoditas.

Gambar 4.1 : **Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 (dalam triliun Rupiah)**

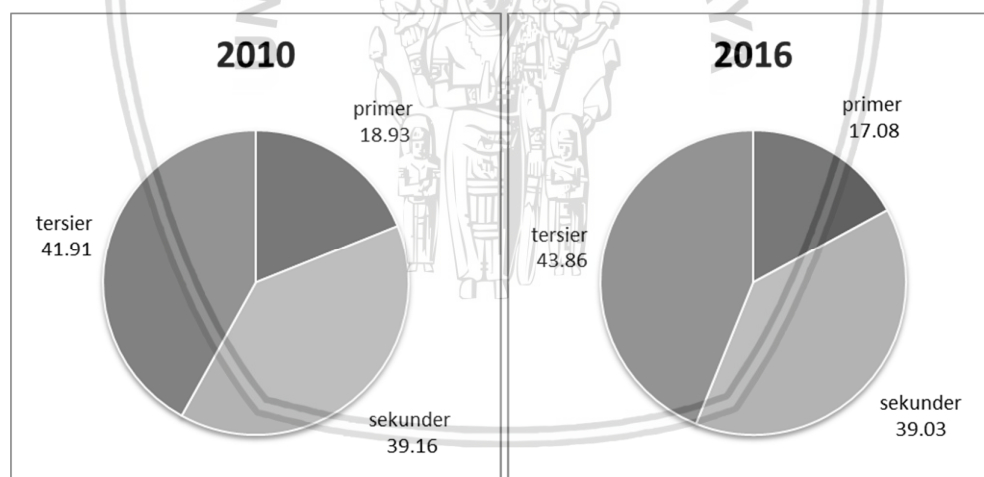


Sumber: Data Diolah BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

4.1.2 Struktur Ekonomi Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2016 sebagian besar berasal dari sektor usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 28,92 persen. Sektor usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menempati posisi kedua dengan sumbangan sebesar 18 persen. Sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor terbesar ketiga dengan kontribusi sebesar 13,31 persen. Secara bersama-sama ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 60,23 persen terhadap total PDRB Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.

Gambar 4.2 : **Perubahan Struktur Perekonomian di Jawa Timur Tahun 2010-2016 (dalam persen)**



Sumber: Data Diolah BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

Berdasarkan gambar di atas, kontribusi sektor usaha sekunder lebih dari dua kali lipat dibandingkan kontribusi sektor usaha primer, baik pada tahun 2010 maupun pada tahun 2016. Perbandingan tersebut mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur telah bergeser dari sektor primer yang tradisional yaitu pertanian dan pertambangan ke sektor sekunder yang lebih

modern yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, serta konstruksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuznets yang memprediksi terjadinya pergeseran perekonomian dari sektor tradisional menuju sektor modern.

Dilihat dari perkembangan per struktur usaha dari tahun 2010 sampai 2016, kontribusi sektor usaha sekunder relatif stabil. Pergeseran terjadi dari sektor usaha primer ke sektor usaha tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan serta sektor jasa-jasa). Kecenderungan tersebut ditandai oleh adanya penurunan kontribusi sektor primer dan peningkatan kontribusi sektor tersier. Gambaran tersebut sesuai dengan pendapat Gunnar Myrdal yang mengindikasikan keuntungan yang lebih besar pada sektor tersier sehingga menyedot sumber daya dari sektor primer.

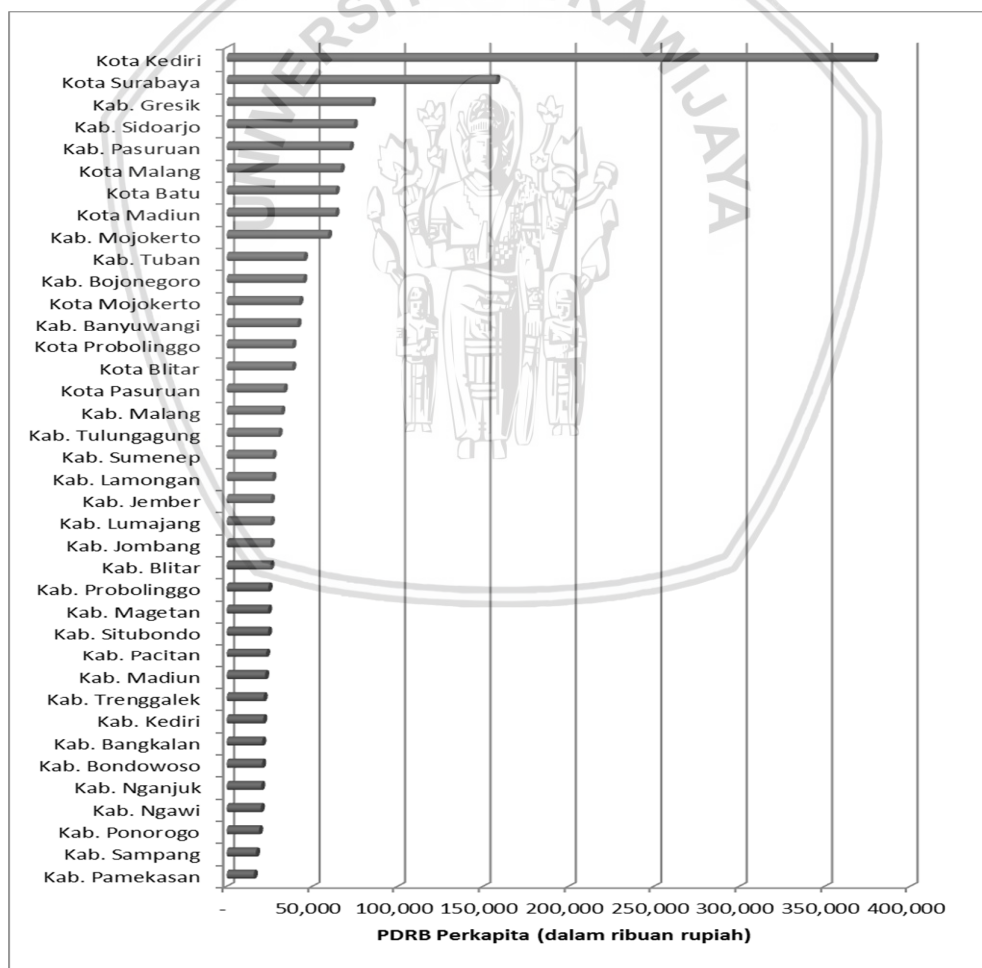
4.1.3 Pendapatan Perkapita Jawa Timur

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator tingkat pembangunan perekonomian dan kemakmuran masyarakat dalam suatu wilayah. Pendapatan perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata masyarakat suatu wilayah. Semakin besar pendapatan perkapita maka dapat mengindikasikan semakin makmur pula masyarakat di daerah tersebut. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut dalam tahun yang sama, sehingga dapat disebut PDRB perkapita. Besarnya PDRB perkapita kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 4.3.

Pendapatan perkapita Jawa Timur meningkat cukup tinggi dari yang sebelumnya Rp26,37 juta pada tahun 2010 menjadi Rp47,47 juta pada tahun 2016. Terdapat

9 daerah yang memiliki nilai pendapatan perkapita lebih tinggi daripada rata-rata provinsi pada tahun 2016, yaitu Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Batu, dan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan 29 daerah lainnya memiliki pendapatan perkapita lebih rendah daripada rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan perekonomian antar daerah yang cukup tinggi, khususnya Kota Kediri dan Kota Surabaya yang PDRB per kapitanya jauh lebih tinggi daripada daerah-daerah lain.

Gambar 4.3 : **PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2016**



Sumber: Data Diolah BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Kota Kediri memiliki PDRB per kapita tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2016 (Rp379 juta) dan bahkan nilainya melebihi dua kali lipat dari PDRB Kota Surabaya (Rp157,7 juta) yang notabene adalah pusat perekonomian di Jawa Timur. Besaran PDRB per kapita Kota Kediri bahkan mencapai 23,95 kali lipat besaran PDRB perkapita Kabupaten Pamekasan (Rp15,8 juta) yang memiliki nilai PDRB per kapita terkecil pada tahun 2016. Fenomena ini terjadi karena PDRB Kota Kediri sebagian besar disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi 81,64% pada tahun 2016. Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan industri rokok Gudang Garam yang merupakan salah satu pabrik rokok terbesar di Asia Tenggara.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi masing-masing variabel penelitian digambarkan menggunakan data terbaru yang tersedia. Berikut deskripsi masing-masing variabel penelitian.

4.2.1 Deskripsi Indeks Gini Provinsi Jawa Timur

Indeks gini dapat memberikan gambaran kondisi pemerataan pendapatan masyarakat dalam suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Secara umum perkembangan indeks gini Provinsi Jawa Timur meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dari yang awalnya sebesar 0,337 pada tahun 2010 menjadi 0,403 pada tahun 2015. Sedangkan indeks gini kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami perkembangan yang cukup beragam.

Berdasarkan tabel 4.2 terdapat beberapa daerah yang pada tahun tertentu sempat mengalami kondisi ketimpangan yang termasuk dalam kategori sedang yaitu dengan nilai indeks gini lebih dari 4. Daerah tersebut antara lain

Kabupaten Gresik, Kota Malang, dan Kota Surabaya (2012), Kota Blitar dan Kota Madiun (2013), serta Kota Kediri dan Kota Surabaya (2015). Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Tabel 4.2 : Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2015

WILAYAH	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Bangkalan	0.29	0.30	0.28	0.28	0.33	0.32
Kab. Banyuwangi	0.24	0.32	0.29	0.30	0.29	0.34
Kab. Blitar	0.27	0.33	0.36	0.33	0.30	0.33
Kab. Bojonegoro	0.28	0.27	0.31	0.32	0.28	0.32
Kab. Bondowoso	0.21	0.29	0.30	0.28	0.27	0.32
Kab. Gresik	0.24	0.33	0.43	0.36	0.28	0.31
Kab. Jember	0.25	0.31	0.28	0.26	0.26	0.33
Kab. Jombang	0.26	0.37	0.30	0.28	0.32	0.32
Kab. Kediri	0.26	0.31	0.32	0.30	0.31	0.34
Kab. Lamongan	0.23	0.29	0.27	0.31	0.27	0.30
Kab. Lumajang	0.24	0.27	0.27	0.23	0.23	0.29
Kab. Madiun	0.25	0.29	0.34	0.30	0.28	0.32
Kab. Magetan	0.27	0.31	0.33	0.34	0.32	0.34
Kab. Malang	0.30	0.33	0.32	0.38	0.33	0.38
Kab. Mojokerto	0.25	0.27	0.28	0.28	0.27	0.31
Kab. Nganjuk	0.24	0.31	0.38	0.33	0.30	0.35
Kab. Ngawi	0.22	0.30	0.30	0.32	0.34	0.34
Kab. Pacitan	0.29	0.34	0.31	0.33	0.31	0.33
Kab. Pamekasan	0.26	0.28	0.24	0.25	0.26	0.34
Kab. Pasuruan	0.26	0.28	0.30	0.28	0.28	0.32
Kab. Ponorogo	0.25	0.29	0.31	0.34	0.31	0.36
Kab. Probolinggo	0.25	0.28	0.30	0.34	0.32	0.30
Kab. Sampang	0.24	0.26	0.25	0.25	0.23	0.30
Kab. Sidoarjo	0.27	0.31	0.33	0.30	0.30	0.35
Kab. Situbondo	0.26	0.26	0.27	0.28	0.29	0.33
Kab. Sumenep	0.27	0.27	0.30	0.29	0.25	0.26
Kab. Trenggalek	0.29	0.34	0.32	0.35	0.31	0.37
Kab. Tuban	0.25	0.28	0.27	0.30	0.24	0.29
Kab. Tulungagung	0.27	0.32	0.34	0.37	0.31	0.36
Kota Batu	0.31	0.32	0.32	0.31	0.29	0.36
Kota Blitar	0.33	0.34	0.38	0.40	0.35	0.37
Kota Kediri	0.28	0.39	0.39	0.33	0.31	0.40
Kota Madiun	0.32	0.33	0.35	0.43	0.34	0.38
Kota Malang	0.35	0.36	0.48	0.38	0.37	0.38
Kota Mojokerto	0.31	0.36	0.30	0.30	0.31	0.36
Kota Pasuruan	0.27	0.37	0.37	0.32	0.31	0.39
Kota Probolinggo	0.24	0.33	0.28	0.38	0.33	0.36
Kota Surabaya	0.36	0.37	0.40	0.37	0.39	0.42
Jawa Timur	0.337	0.351	0.362	0.368	0.403	0.403

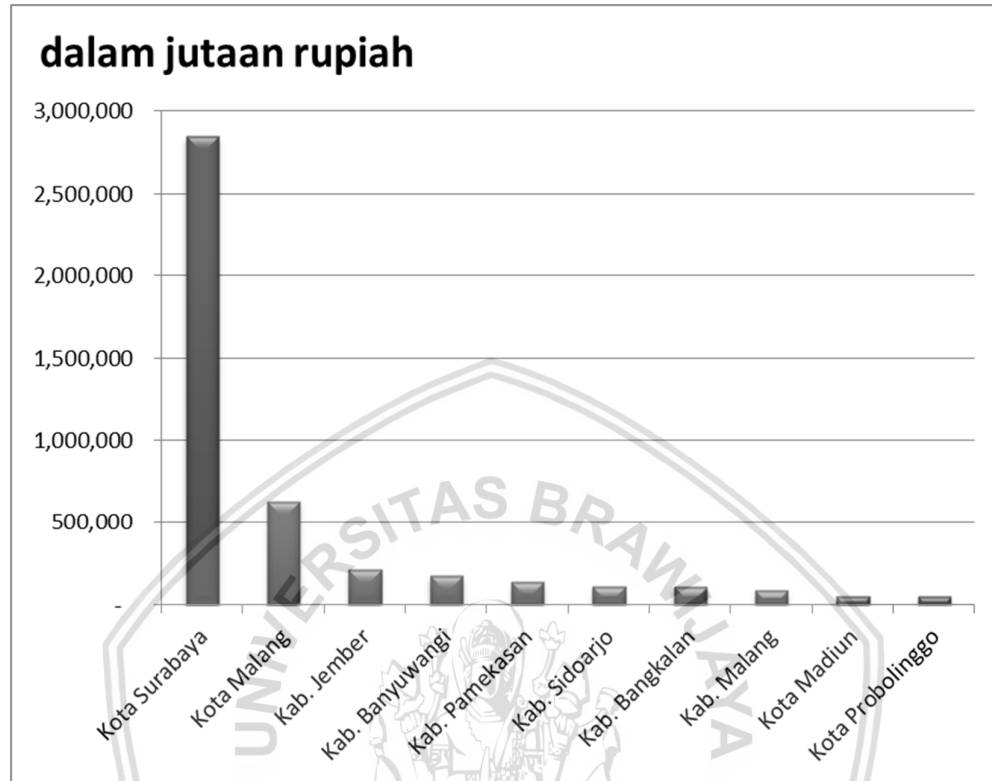
Sumber: Data Diolah BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

4.2.2 Deskripsi Rasio Belanja Modal K/L di Provinsi Jawa Timur

Belanja modal K/L adalah realisasi belanja modal satuan kerja instansi pemerintah pusat yang dananya bersumber dari APBN. Pada tahun 2010 total belanja modal K/L di Jawa Timur sebesar Rp5.242,64 miliar dan kemudian turun sedikit menjadi Rp5.017,34 miliar pada tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 realisasi belanja modal K/L kembali mengalami kenaikan menjadi Rp5.453,55 miliar dan Rp6.723,16 miliar. Penurunan yang cukup tinggi terjadi di tahun 2014 dimana alokasi belanja modal K/L adalah sebesar Rp3.884,83 miliar sebelum akhirnya naik kembali menjadi Rp4.790,17 miliar pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 belanja modal K/L kembali turun menjadi Rp4.114,45 miliar. Dari deskripsi di atas dapat diamati bahwa alokasi belanja K/L di Jawa Timur sangat berfluktuasi tergantung pada kebutuhan belanja dan kebijakan anggaran masing-masing instansi pemerintah. Untuk gambaran belanja modal K/L pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2010-2016 dapat dilihat pada gambar 4.4.

Kota Surabaya merupakan daerah yang paling dominan dalam distribusi belanja modal K/L di Jawa Timur, dengan rata-rata proporsi sebesar 55,75% dari total belanja K/L di Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2016. Kota Malang menempati posisi kedua distribusi belanja modal K/L terbesar setelah Kota Surabaya dengan rata-rata alokasi sebesar 12,84% dari total realisasi belanja modal K/L di Jawa Timur. Urutan selanjutnya ditempati oleh Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Bangkalan. Kemudian ada pula Kabupaten Malang, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo yang melengkapi sepuluh besar rata-rata belanja modal K/L di Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2016. Sedangkan distribusi terendah terdapat pada Kota Pasuruan dengan rata-rata distribusi sebesar 0,11% dari total realisasi belanja modal K/L di Jawa Timur.

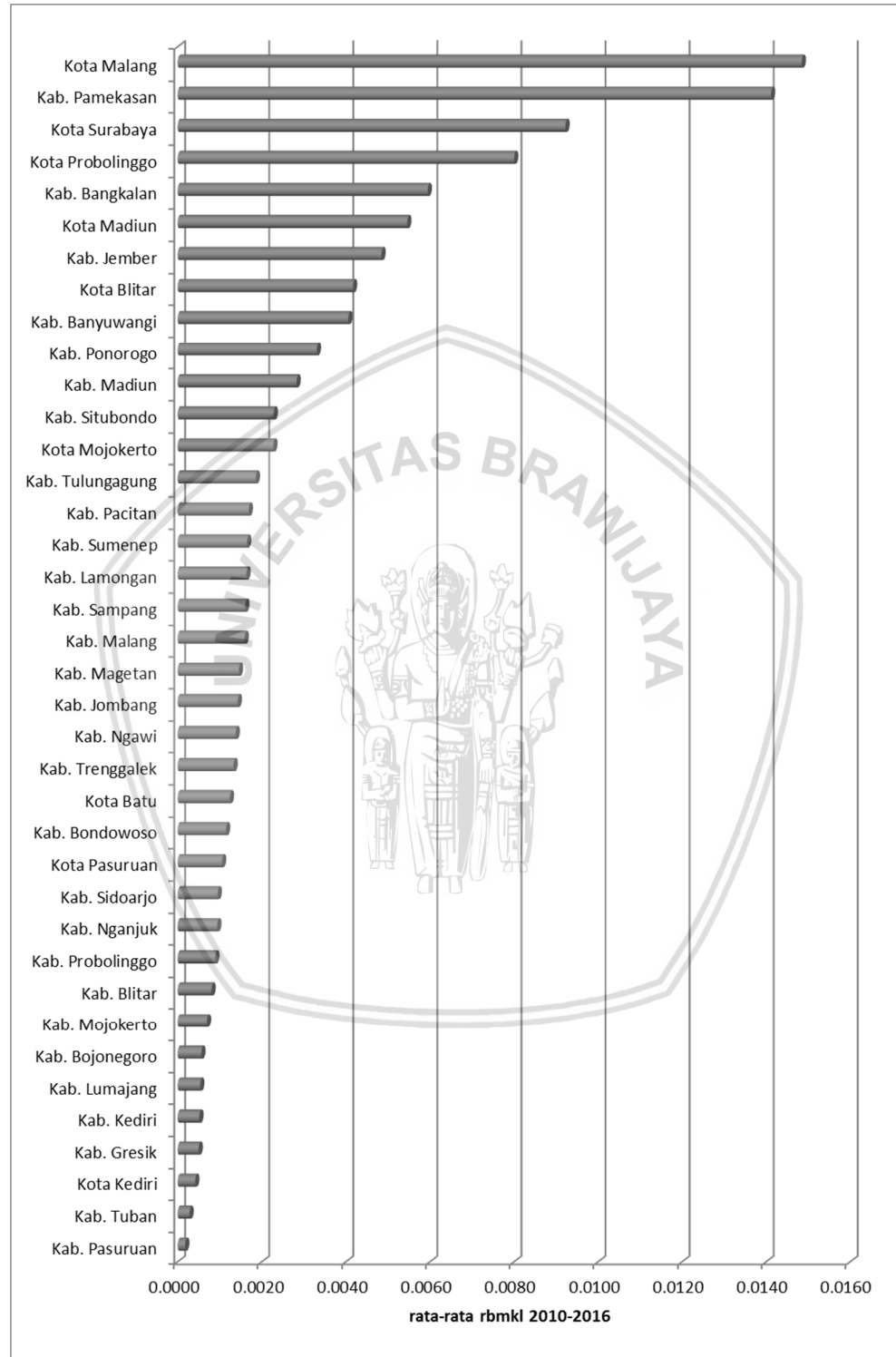
Gambar 4.4 : **10 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur dengan Rata-rata Belanja Modal K/L Tertinggi Tahun 2010-2016**



Sumber: Data Diolah DJPb, 2010-2016

Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi belanja modal K/L terhadap PDRB dapat dinyatakan dengan menggunakan rasio. Rasio belanja modal K/L terhadap PDRB dapat diartikan sebagai perbandingan antara belanja modal K/L yang didanai dari APBN terhadap total PDRB suatu daerah dalam satu periode tertentu. Rasio ini mencerminkan kontribusi belanja modal K/L dalam pembentukan PDRB suatu daerah. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin besar pula kontribusi belanja modal K/L dalam pembentukan PDRB pada daerah tersebut. Gambar 4.5 merangkum rata-rata rasio belanja modal K/L terhadap APBD di Jawa Timur tahun 2010-2016.

Gambar 4.5 : Rata-rata Rasio Belanja Modal K/L Terhadap PDRB Di Jawa Timur Tahun 2010-2016



Sumber: Data Diolah DJPb, 2010-2016

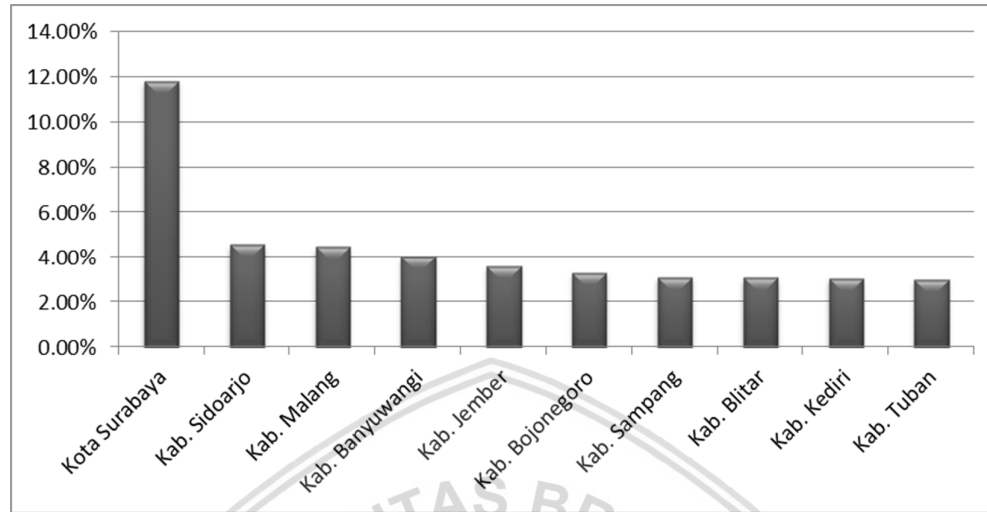
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Kota Malang memiliki rata-rata rasio belanja modal K/L terhadap PDRB tertinggi di Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2016 dengan rata-rata rasio sebesar 0,0148. Kabupaten Pamekasan memiliki rata-rata rasio RBMKL yang hampir sama dengan Kota Malang yaitu 0,0141. Sedangkan rata-rata rasio belanja modal K/L terhadap PDRB terendah terdapat pada Kabupaten Pasuruan dengan rata-rata rasio 0,0002. Diikuti kemudian oleh Kabupaten Tuban dan Kota Kediri yang masing-masing memiliki rata-rata rasio 0,0003 dan 0,0004.

4.2.3 Deskripsi Rasio Belanja Modal APBD di Provinsi Jawa Timur

Belanja modal APBD merupakan realisasi belanja modal instansi pemerintah daerah yang didanai dari APBD dalam suatu daerah tertentu. Belanja modal APBD di Provinsi Jawa Timur secara umum mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 total belanja modal APBD di Jawa Timur tercatat sebesar Rp5.444,39 miliar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka Rp18.390,78 miliar pada tahun 2016. Besaran belanja modal APBD kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2016 mencapai lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2010.

Besaran belanja modal APBD kabupaten/kota di Jawa Timur bervariasi tergantung pada kebijakan anggaran dan pembangunan masing-masing daerah. Tetapi perkembangan realisasi belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur secara umum mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Peningkatan besaran belanja modal APBD tersebut mengindikasikan upaya pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada pentingnya belanja modal dalam perekonomian. Gambaran rata-rata belanja modal APBD kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2010-2016 dapat dilihat pada gambar 4.6.

Gambar 4.6 : **10 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur dengan Rata-rata Alokasi Belanja Modal APBD Tertinggi Tahun 2010-2016**



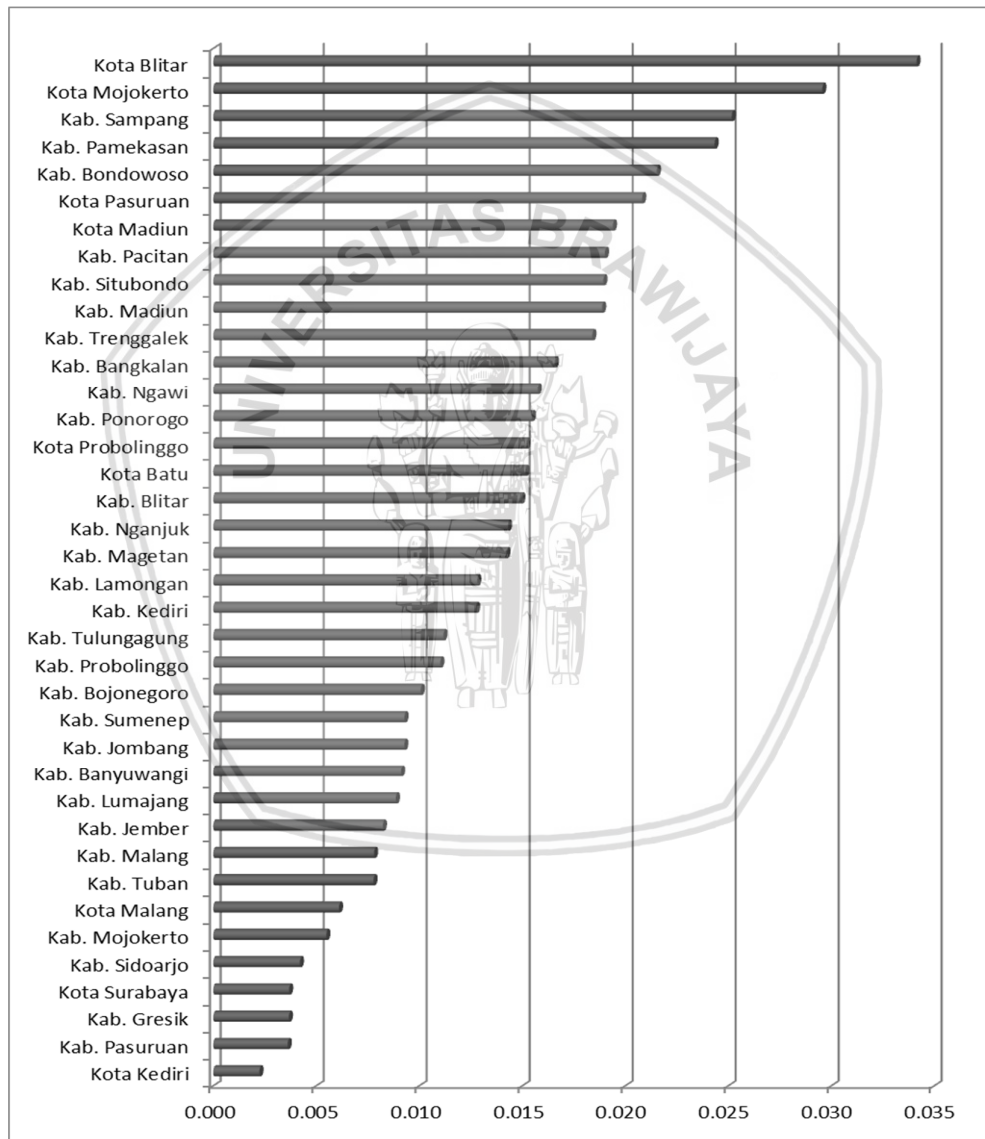
Sumber: Data Diolah DJPK, 2017

Kota Surabaya mendominasi distribusi belanja modal APBD di Jawa Timur dengan rata-rata alokasi 11,82% dari total belanja modal APBD kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini terjadi karena besarnya potensi fiskal Kota Surabaya yang mempengaruhi besaran alokasi untuk belanja modal APBD. Hal itu tidak terlepas dari peran Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur. Kemudian di bawahnya terdapat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang dengan rata-rata distribusi belanja modal APBD sebesar 4,59% dan 4,49% serta Kabupaten Banyuwangi dengan nilai 4,05%. Sedangkan untuk daerah lain di Jawa Timur distribusinya kurang dari 4%.

Untuk melihat kontribusi belanja modal APBD dalam pembentukan PDRB dapat menggunakan rasio. Rasio belanja modal APBD terhadap PDRB dapat diartikan sebagai perbandingan antara belanja modal yang didanai dari APBD terhadap total PDRB suatu daerah dalam satu periode tertentu. Rasio ini mencerminkan kontribusi belanja modal APBD dalam pembentukan PDRB suatu

daerah. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin besar pula kontribusi belanja modal APBD dalam pembentukan PDRB pada daerah tersebut. Gambar 4.7 menggambarkan rata-rata rasio modal APBD terhadap PDRB tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2016.

Gambar 4.7 : **Rata-rata Rasio Belanja Modal APBD Terhadap PDRB Di Jawa Timur Tahun 2010-2016**



Sumber: Data Diolah DJPK, 2017

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Kota Blitar memiliki rata-rata rasio tertinggi untuk variabel belanja modal APBD terhadap PDRB tahun 2010-2016. Diikuti kemudian oleh Kota Mojokerto, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bondowoso, dan Kota Pasuruan sebagai daerah yang memiliki rata-rata rasio belanja modal APBD terhadap PDRB tahun 2010-2016 lebih besar daripada 0,02. Sedangkan rata-rata rasio terendah terdapat pada Kota Kediri dengan rata-rata rasio 0,002. Selanjutnya ada Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya yang masing-masing memiliki rata-rata rasio belanja modal APBD terhadap PDRB tahun 2010-2016 sebesar kurang dari 0,004.

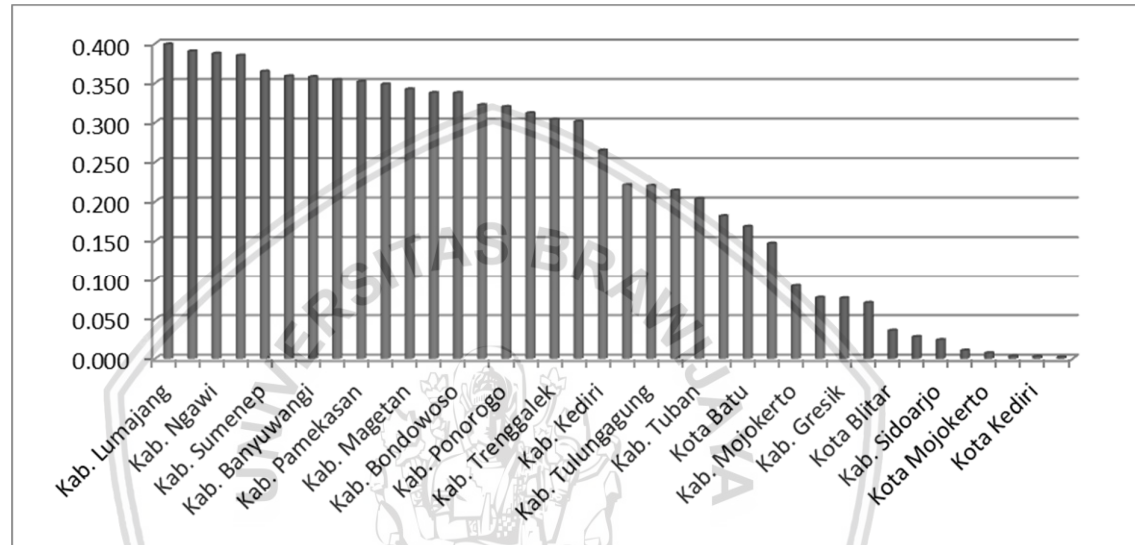
4.2.4 Deskripsi Variabel Rasio PDRB Sektor Pertanian di Jawa Timur

Rasio PDRB sektor pertanian merupakan perbandingan antara PDRB sektor pertanian dengan total PDRB di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Rasio ini mencerminkan kontribusi PDRB sektor pertanian dalam pembentukan total PDRB di satu daerah. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula peran sektor pertanian dalam perekonomian di daerah tersebut. Rata-rata rasio PDRB sektor pertanian tiap-tiap kabupaten/kota terhadap total PDRB Jawa Timur pada tahun 2010-2016 dapat dilihat pada gambar 4.8.

Secara umum peran sektor pertanian tahun 2010 sampai 2016 di Kabupaten/Kota di Jawa Timur cukup bervariasi. Kabupaten Lumajang memiliki rata-rata rasio terbesar dengan nilai rasio 0,399. Disusul kemudian oleh Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten dengan rasio PDRB sektor pertanian terendah dengan nilai 0,024. Sedangkan untuk daerah perkotaan pada umumnya menempati urutan terendah dalam kontribusi sektor

pertaniannya. Kota Surabaya menjadi daerah perkotaan yang memiliki rata-rata kontribusi pertanian terendah dengan rasio 0,002 dan disusul kemudian oleh Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Mojokerto yang memiliki nilai rata-rata rasio kurang dari 0,01.

Gambar 4.8 : Rata-rata Rasio PDRB Sektor Pertanian Terhadap Total PDRB Jawa Timur Tahun 2010-2016

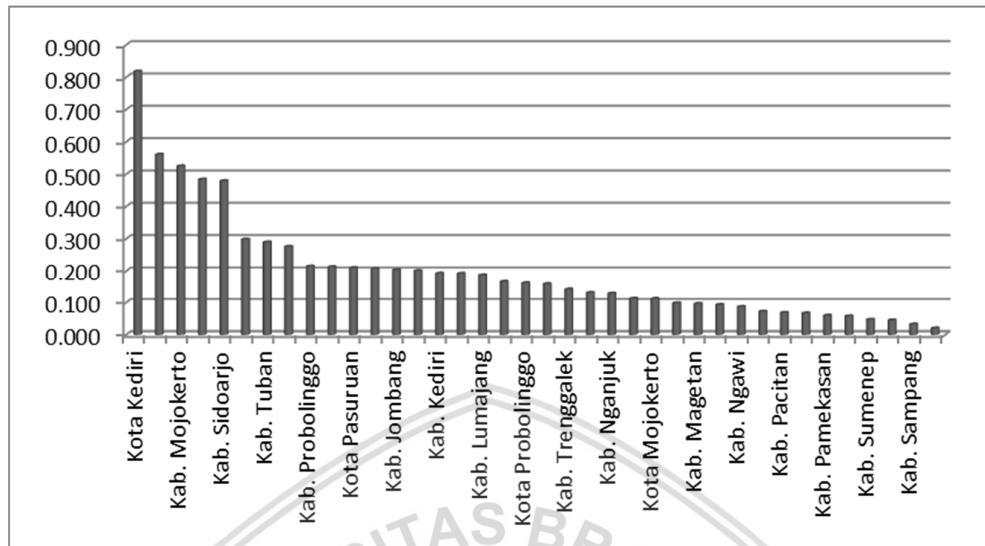


Sumber: Data Diolah BPS Provinsi Jawa Timur, 2015-2017

4.2.5 Deskripsi Variabel Rasio PDRB Sektor Industri di Jawa Timur

Rasio PDRB Sektor Industri merupakan perbandingan antara PDRB sektor industri dengan total PDRB di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Rasio PDRB Sektor Industri mencerminkan kontribusi dari PDRB Sektor Industri terhadap pembentukan PDRB total dalam satu daerah tertentu. Semakin tinggi rasio PDRB sektor industri maka semakin besar pula peran sektor industri dalam perekonomian di daerah tersebut. Rata-rata rasio PDRB sektor industri tiap-tiap kabupaten/kota terhadap total PDRB Jawa Timur pada tahun 2010-2016 dapat dilihat pada gambar 4.9.

Gambar 4.9 : Rata-rata Rasio PDRB Sektor Industri Terhadap Total PDRB Jawa Timur Tahun 2010-2016



Sumber: Data Diolah BPS Provinsi Jawa Timur, 2015-2017

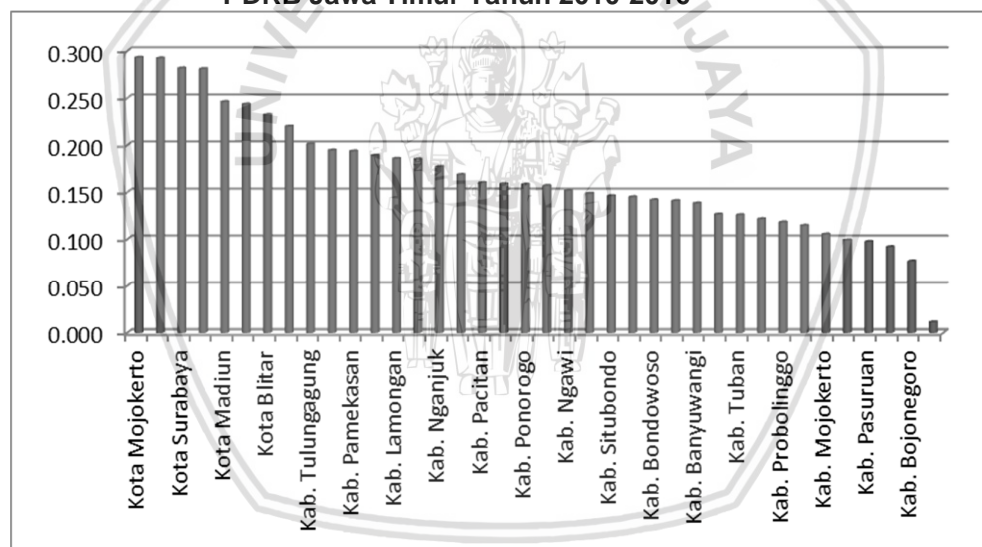
Kota Kediri menjadi daerah dengan rata-rata rasio PDRB sektor industri tertinggi di Jawa Timur dalam kurun waktu 2010 sampai 2016. Nilai rata-rata rasio PDRB sektor industri di Kota Kediri mencapai 0,818 yang artinya lebih dari 80% PDRB Kota Kediri dihasilkan oleh sektor industri. Di urutan selanjutnya terdapat Kabupaten Pasuruan dengan rata-rata rasio 0,561 dan Kabupaten Mojokerto dengan rasio 0,525. Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo melengkapi lima daerah dengan rasio PDRB sektor industri tertinggi dengan masing-masing memiliki rata-rata rasio 0,484 dan 0,480.

Sedangkan daerah dengan rata-rata rasio PDRB sektor industri terendah adalah Kabupaten Bangkalan dengan rata-rata rasio 0,021. Kabupaten Sampang menempati posisi kedua terendah dengan rata-rata rasio 0,033. Disusul kemudian oleh Kota Batu, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Bojonegoro yang melengkapi lima daerah dengan rata-rata rasio PDRB sektor industri terendah.

4.2.6 Deskripsi Variabel Rasio PDRB Sektor Perdagangan di Jawa Timur

Rasio PDRB sektor perdagangan merupakan perbandingan antara PDRB sektor perdagangan dengan total PDRB di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Rasio PDRB sektor perdagangan mencerminkan kontribusi dari PDRB sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB total dalam satu daerah tertentu. Semakin tinggi rasio PDRB sektor perdagangan maka semakin besar pula peran sektor perdagangan dalam perekonomian di daerah tersebut. Rata-rata rasio PDRB sektor perdagangan tiap-tiap kabupaten/kota terhadap total PDRB Jawa Timur pada tahun 2010-2016 dapat dilihat pada gambar 4.10.

Gambar 4.10 : **Rata-rata Rasio PDRB Sektor Perdagangan Terhadap Total PDRB Jawa Timur Tahun 2010-2016**



Sumber: Data Diolah BPS Provinsi Jawa Timur, 2015-2017

Kota Mojokerto dan Kota Malang menempati urutan teratas rata-rata rasio PDRB sektor perdagangan di Jawa Timur dengan rasio masing-masing sebesar 0,293 dan 0,292. Disusul kemudian oleh Kota Surabaya dengan rata-rata rasio 0,282 dan Kota Pasuruan dengan rasio 0,281 serta Kota Madiun dengan rata-rata rasio 0,246. Sedangkan kontribusi PDRB sektor perdagangan terkecil

ditempati oleh Kabupaten Bangkalan dengan rata-rata rasio 0,011. Kemudian ada Kabupaten Bojonegoro dan Kota Kediri dengan rata-rata rasio masing-masing sebesar 0,077 dan 0,092. Selanjutnya ada Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sumenep yang memiliki rata-rata rasio sebesar 0,098 dan 0,099.



4.3 Hasil Analisis Data

Hasil analisis data untuk pemilihan spesifikasi model terbaik yang digunakan untuk regresi data serta hasil regresi data panel menggunakan aplikasi EViews 9 dapat kami tampilkan sebagai berikut.

4.3.1 Pemilihan Spesifikasi Model Terbaik

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel yang dalam metode estimasinya dilakukan melalui tiga pendekatan atau model, yaitu *Common Effects Model*, *Fixed Effects Model*, dan *Random Effects Model*. Untuk memilih salah satu model estimasi yang dianggap paling tepat maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut.

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui pilihan model terbaik antara *Common Effects Model* dengan *Fixed Effects Model*. Hipotesis dalam uji Chow adalah H_0 untuk *Common Effect Model* dan H_1 untuk *Fixed Effect Model*.

Untuk mengetahui apakah menerima H_0 atau H_1 , maka perlu memperhatikan *F Restricted*, yaitu dengan melihat *p-value F* hasil regresi dengan menggunakan model *Fixed Effects*. H_0 ditolak apabila *P-value F* dihasilkan lebih kecil dari α 5%. Sebaliknya, H_0 akan diterima apabila *P-value F* > dari nilai α 5%. Hasil dari uji chow sebagaimana tergambar dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3 : Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	3.655921	(37,185)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	125.127698	37	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji chow diatas dapat dilihat bahwa nilai *p-value F* sebesar 0,0000 atau kurang dari α 5%, sehingga pengujian tersebut menolak H_0 dan menerima H_1 . Artinya adalah pada tingkat kepercayaan 95%, model yang digunakan dalam meregresi data panel adalah dengan menggunakan *Fixed Effects Model*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui pilihan model terbaik antara *Random Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Hipotesis yang dibentuk dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Untuk mengetahui apakah keputusannya menerima H_0 atau H_1 , maka cara yang digunakan adalah dengan melihat *Prob.chi²* pada hasil uji Hausman. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa $(\text{Prob.chi}^2) < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan sebaliknya jika $(\text{Prob.chi}^2) > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dalam pengujian ini nilai α yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. Hasil dari uji hausman tergambar dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 : Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.497206	5	0.0001

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji Hausman diatas dapat dilihat bahwa nilai $Prob.chi^2$ adalah sebesar 0,0001 atau kurang dari α 5%, sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Artinya adalah pada tingkat kepercayaan 95%, model yang digunakan dalam meregresi data panel adalah dengan menggunakan *Fixed Effects Model*.

Dari hasil uji chow dan uji hausman diatas dapat diambil kesimpulan bahwa model terbaik untuk metode estimasi data panel ini adalah dengan menggunakan *Fixed Effects Model*.

4.3.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effects Model* diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 : Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.280980	0.137201	2.047940	0.0420
RBMKL	-2.409618	0.992726	-2.427274	0.0162**
RBMAPBD	1.801513	0.559401	3.220431	0.0015***
RPDRBTAN	-0.274091	0.292699	-0.936427	0.3503
RPDRBIND	-0.898113	0.504133	-1.781500	0.0765*
RPDRBDAG	1.515984	0.478831	3.166008	0.0018***

Keterangan: * $\alpha=0,1$; ** $\alpha=0,05$; *** $\alpha=0,01$

Sumber: Data Diolah, 2018

Dari hasil regresi diatas dapat diperoleh persamaan yang menunjukkan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{GINI} = & 0.280980 - 2.409618 \cdot \text{RBMKL} + 1.801513 \cdot \text{RBMAPBD} \\ & - 0.898113 \cdot \text{RPDRBIND} + 1.515984 \cdot \text{RPDRBDAG} \end{aligned}$$

Interpretasi koefisien dari masing-masing variabel, dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,280980

Apabila diasumsikan variabel bebas adalah konstan maka nilai indeks gini adalah sebesar 0,280980;

2. Koefisien variabel rasio belanja modal K/L terhadap PDRB (RBMKL)
-2,409618

Kenaikan rasio belanja modal K/L terhadap PDRB sebesar 1% akan cenderung menurunkan ketimpangan sebesar 2,409618%;

3. Koefisien variabel rasio belanja modal APBD terhadap PDRB (RBMAPBD) 1.801513

Kenaikan rasio belanja modal APBD terhadap PDRB sebesar 1% akan cenderung meningkatkan ketimpangan sebesar 1.801513%;

4. Koefisien variabel rasio PDRB sektor pertanian terhadap PDRB (RPDRBTAN) -0.274091

Kenaikan rasio PDRB sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 1% akan cenderung menurunkan ketimpangan sebesar -0.274091%;

5. Koefisien variabel rasio PDRB sektor industri terhadap PDRB (RPDRBIND) -0.898113

Kenaikan rasio PDRB sektor industri terhadap PDRB sebesar 1% akan cenderung menurunkan ketimpangan sebesar -0.898113%;

6. Koefisien variabel rasio PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB (RPDRBDAG) 1.515984

Kenaikan rasio PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 1% akan cenderung meningkatkan ketimpangan sebesar 1.515984%

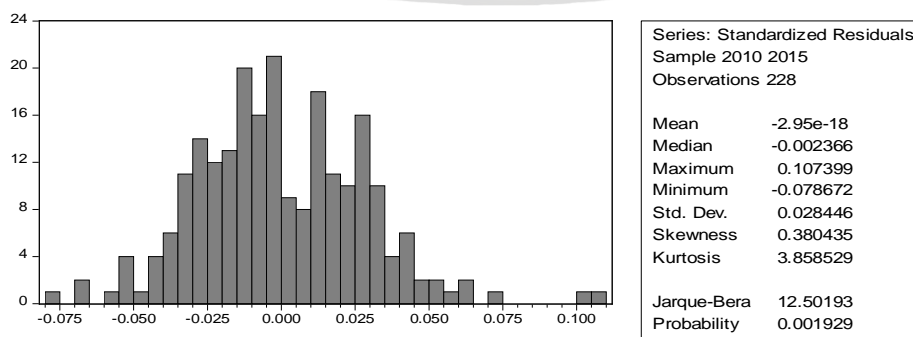
4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari empat pengujian antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk hasil masing-masing pengujian dapat kami sajikan dalam pembahasan berikut.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk dapat mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau kedua variabel mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang dapat dilakukan dalam uji normalitas ini dengan cara melihat nilai probabilitas dari Jarque-Bera dalam penelitian. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima yang artinya data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Jarque-Bera $< \alpha = 0,05$, maka H_1 diterima yang artinya data tidak terdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut ini.

Gambar 4.11 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah, 2018

Dari hasil uji normalitas pada gambar 4.11 di atas dapat dilihat bahwa nilai Probabilitas dari Jarque-Bera sebesar 0,001929 atau signifikan terhadap $\alpha=0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa data dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel bebas. Masalah multikolinearitas terjadi apabila dalam matriks korelasi antar variabel bebas mempunyai nilai lebih dari 0.8. Tabel 4.6 berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas.

Tabel 4.6 : Hasil Uji Multikolinearitas

	GINI	RBMKL	RBMABPD	RPDRBTAN	RPDRBIND	RPDRBDAG
GINI	1.0000	0.1469	0.0967	-0.4550	0.1136	0.4412
RBMKL	0.1469	1.0000	0.0932	-0.1638	-0.1826	0.3531
RBMABPD	0.0967	0.0932	1.0000	0.1324	-0.5255	0.2831
RPDRBTAN	-0.4550	-0.1638	0.1324	1.0000	-0.5131	-0.4001
RPDRBIND	0.1136	-0.1826	-0.5255	-0.5131	1.0000	-0.1637
RPDRBDAG	0.4412	0.3531	0.2831	-0.4001	-0.1637	1.0000

Sumber: Data Diolah, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada nilai korelasi antar variabel bebas yang lebih dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji White.

Wilayah penolakan H_0 adalah probabilitas $\text{Obs}^*\text{R-squared} < \alpha$, sedangkan penerimaan H_0 adalah nilai probabilitas $\text{Obs}^*\text{R-squared} > \alpha$. Jika H_0 ditolak dan H_1 diterima maka terdapat heteroskedastisitas sehingga varians dari variabel gangguan untuk tiap pengamatan bersifat berbeda untuk tiap variabel bebasnya. Sebaliknya apabila H_0 diterima dan H_1 ditolak maka tidak terdapat heteroskedastisitas sehingga varians variabel gangguan untuk setiap nilai pengamatan adalah sama untuk seluruh variabel bebas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 : **Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White)**

F-statistic	0.965803	Prob. F(20,207)	0.5052
Obs*R-squared	19.45978	Prob. Chi-Square(20)	0.4921
Scaled explained SS	19.76018	Prob. Chi-Square(20)	0.4730

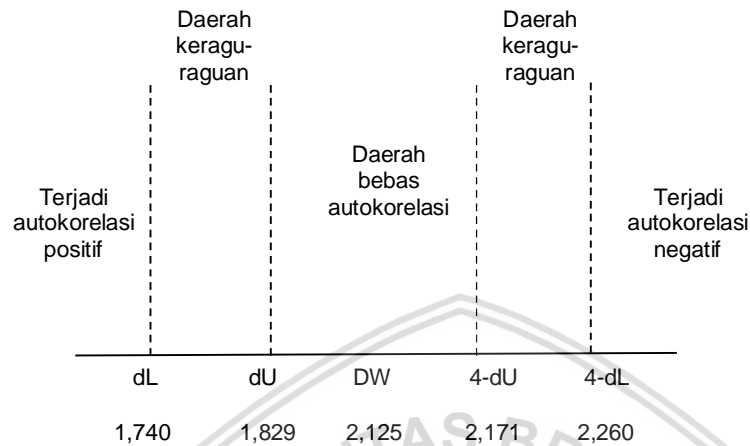
Sumber: Data Diolah, 2018

Dari hasil pengujian sebagaimana tertera dalam tabel 4.7 di atas dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas $\text{Obs}^*\text{R-squared}$ sebesar 0,4921 atau lebih besar dari $\alpha=0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara variabel gangguan pada periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Gambaran hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada gambar 4.12.

Gambar 4.12 Hasil Uji Autokorelasi



Sumber: Penulis, 2018

Nilai dL dan dU diambil pada jumlah $n=228$ sehingga dibulatkan menjadi $n=230$. Dengan jumlah variabel sebanyak 6, maka diperoleh nilai $dL=1,740$ dan nilai $dU=1,829$. Dengan nilai $DW=2,125$ berada pada daerah bebas autokorelasi maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini tidak terdapat autokorelasi.

4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari uji t, uji F, dan uji R^2 . Masing-masing hasil pengujian dapat kami jelaskan sebagai berikut.

4.5.1 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji t ini dapat dilakukan dengan cara melihat *p-value* ($P>|z|$) dari masing-masing variabel bebas. Apabila *p-value* ($P>|z|$) masing-

masing variabel bebas lebih kecil dibandingkan dengan *alpha* ($p\text{-value } (P>|z|) < \alpha$) maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya, apabila *p-value* ($P>|z|$) masing-masing variabel bebas lebih besar sama dengan *alpha* ($p\text{-value } (P>|z|) \geq \alpha$) maka berarti bahwa masing-masing variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Variabel rasio belanja modal K/L terhadap PDRB (RBMKL)

Variabel ini memiliki nilai probabilitas 0,0162 sehingga pengaruhnya signifikan pada $\alpha=0,05$. Dengan koefisien sebesar -2,409618 maka pengaruh RBMKL terhadap ketimpangan bersifat negatif. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal dan juga tidak sesuai dengan temuan dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Turnovsky (2015) dan Hur (2014).

2. Variabel rasio belanja modal APBD terhadap PDRB (RMAPBD)

Variabel ini memiliki nilai probabilitas 0,0015 sehingga pengaruhnya signifikan pada $\alpha=0,01$. Dengan koefisien sebesar 1.801513 maka pengaruh RMAPBD terhadap ketimpangan bersifat positif. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal dan konsisten terhadap temuan dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Turnovsky (2015), Hur (2014), dan Sabir (2015).

3. Variabel rasio PDRB sektor pertanian terhadap PDRB (RPDRBTAN)

Variabel ini memiliki nilai probabilitas 0,3503 sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Dengan koefisien sebesar -0.274091 maka pengaruh RPDRBTAN terhadap ketimpangan bersifat negatif.

4. Variabel rasio PDRB sektor industri terhadap PDRB (RPDRBIND)

Variabel ini memiliki nilai probabilitas 0,0765 sehingga pengaruhnya signifikan pada $\alpha=0,1$. Dengan koefisien sebesar -0.898113 maka pengaruh RPDRBIND terhadap ketimpangan bersifat negatif.

5. Variabel rasio PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB (RPDRBDAG)

Variabel ini memiliki nilai probabilitas 0,0018 sehingga pengaruhnya signifikan pada $\alpha=0,01$. Dengan koefisien sebesar 1.515984 maka pengaruh RPDRBDAG terhadap ketimpangan bersifat positif.

4.5.2 Uji F

Uji F ini dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara sekaligus tanpa memperhatikan tingkat pengaruh dari setiap variabel. Uji F memberikan hasil yang signifikan meskipun hanya terdapat satu atau dua variabel bebas yang berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat. Cara melakukan uji F adalah dengan membandingkan *p-value* ($Prob > \chi^2$) dengan *alpha*. *Alpha* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila *p-value* ($Prob > \chi^2$) $< \alpha = 5\%$ maka variabel bebas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Kebalikannya, jika *p-value* ($Prob > \chi^2$) $\geq \alpha = 5\%$ maka dinyatakan bahwa variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil regresi diatas dapat dilihat bahwa *p-value* ($Prob > \chi^2$) sebesar 0.0000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat

dinyatakan bahwa variabel bebas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

4.5.3 Uji R^2

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya variasi perubahan variabel terikat yang dijelaskan oleh semua variabel bebas. Semakin besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan variabel terikat, maka nilai R^2 akan semakin besar. Nilai koefisien determinasi ini terletak diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana semakin tinggi nilai R^2 suatu regresi (mendekati 1), maka hasil regresi tersebut akan semakin baik.

Berdasarkan hasil regresi diatas dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,590359. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat adalah sebesar 59,0359%. Sedangkan 40,9641 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

4.6 Pembahasan

Secara ringkas, hipotesis dan hasil regresi data panel dengan menggunakan *fixed effects model* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 : **Hipotesis dan Hasil**

Variabel	Hipotesis	Hasil	Keterangan
Belanja Modal K/L	Negatif dan signifikan	Negatif dan signifikan	Hasil sesuai hipotesis
Belanja Modal APBD	Negatif dan signifikan	Positif dan signifikan	Hasil tidak sesuai hipotesis

Sumber: Penulis, 2018

4.6.1 Pengaruh Belanja Modal K/L Terhadap Ketimpangan

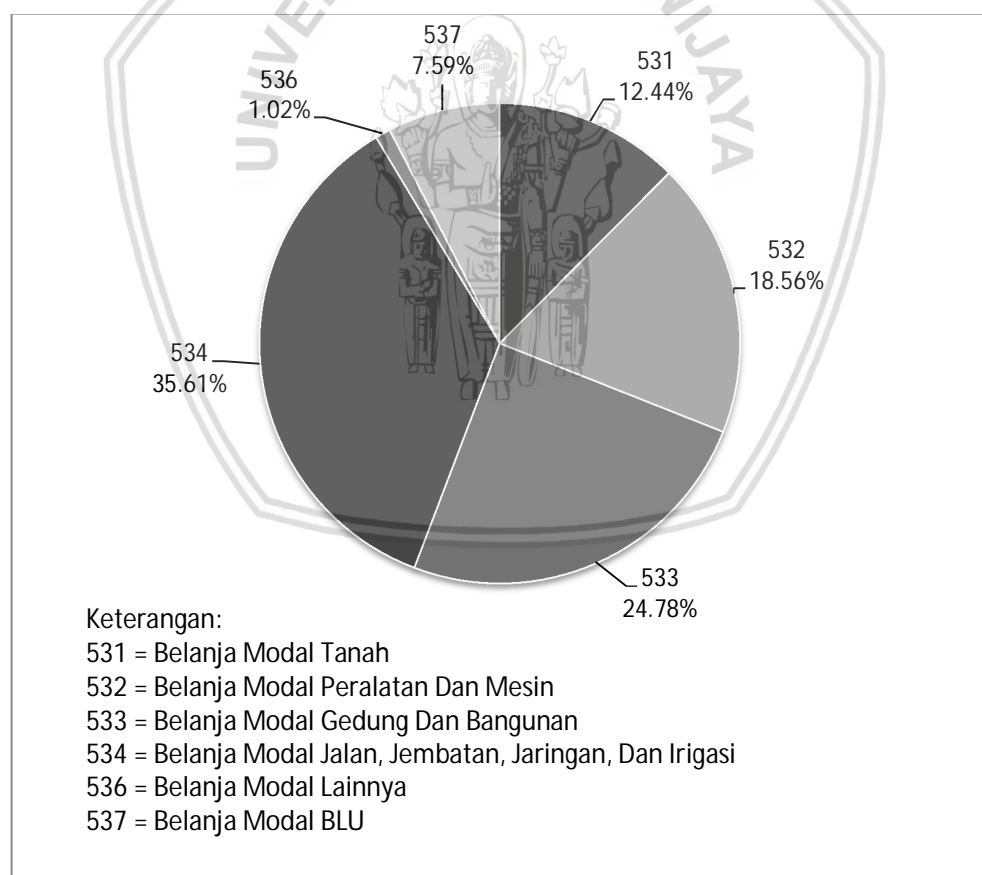
Hasil regresi untuk variabel rasio belanja modal K/L dalam penelitian ini menghasilkan output berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya bahwa semakin besar rasio belanja modal K/L terhadap PDRB akan memberikan dampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendukung pemerataan pendapatan.

Penambahan belanja modal K/L dapat mengurangi tingkat ketimpangan apabila menghasilkan rasio terhadap PDRB yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya persentase kenaikan belanja modal K/L harus melebihi persentase kenaikan PDRB pada tahun yang sama. Jadi variabel belanja modal K/L dapat menjadi variabel penyeimbang dalam rangka menciptakan pemerataan ekonomi.

Hasil ini sesuai dengan dugaan awal bahwa belanja modal pemerintah yang dilaksanakan oleh K/L berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Belanja modal yang dilakukan oleh K/L secara signifikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hur (2014) dan Turnovsky (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran belanja modal akan meningkatkan ketimpangan.

Distribusi alokasi belanja modal K/L selama tahun 2010-2015 dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 4.13.

Gambar 4.13 : **Distribusi Alokasi Belanja Modal K/L Tahun 2010-2015**



Sumber: Data Diolah DJPb, 2010-2015

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa ini sebagian besar alokasi belanja modal K/L tahun 2010-2015 yaitu sebesar 55,78% dibelanjakan dalam investasi produktif, yaitu dalam bentuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal gedung dan bangunan. Ditambah dengan belanja modal BLU, maka keempat jenis belanja ini pada umumnya digunakan untuk mendukung pelayanan dan operasional sehari-hari pemerintah sehingga manfaatnya bersifat lebih menyebar kepada seluruh masyarakat.

Dari gambar 4.13 dapat dilihat bahwa sebagian besar belanja modal K/L merupakan pembelian barang modal yang digunakan untuk mendukung operasional sehari-hari K/L tersebut. Tepatnya sekitar 63,37% belanja modal K/L digunakan untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta belanja BLU yang notabene kesemuanya merupakan pendukung pelayanan pemerintah. Sedangkan belanja yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat hanya sebesar 35,61% yang terdapat dalam belanja modal jalan, jembatan, jaringan, dan irigasi. Bahkan dari belanja tersebut termasuk di dalamnya adalah belanja di dalam lingkungan perkantoran, misalnya instalasi jaringan listrik kantor. Dari rincian belanja modal tersebut nampaknya efektivitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan instansi K/L cukup baik sehingga dapat turut berperan dalam pengurangan ketimpangan pendapatan.

Tabel 4.9 berikut ini menyajikan kelompok-kelompok daerah berdasarkan besaran rata-rata ketimpangan dan rata-rata RBMKL. Dengan membagi besaran variabel berdasarkan nilai median diperoleh 19 daerah dengan kategori tinggi dan 19 daerah dengan kategori rendah pada masing-masing variabel.

Tabel 4.9: **Sebaran Daerah Berdasarkan Variabel Ketimpangan dan Rasio Belanja Modal K/L**

	RBMKL Rendah	RBMKL Tinggi
	Kuadran I	Kuadran II
Ketimpangan Tinggi	Kota Pasuruan Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kota Batu Kab. Pacitan Kab. Nganjuk Kab. Magetan Kab. Gresik	Kota Madiun Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Mojokerto Kab. Ponorogo Kota Malang Kota Surabaya Kab. Malang Kab. Tulungagung Kota Kediri Kab. Sidoarjo
	Kuadran IV	Kuadran III
Ketimpangan Rendah	Kab. Bondowoso Kab. Ngawi Kab. Bangkalan Kab. Madiun Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Pasuruan Kab. Tuban Kab. Lumajang Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro	Kab. Pamekasan Kab. Situbondo Kab. Sampang Kab. Probolinggo Kab. Jember Kab. Mojokerto Kab. Banyuwangi Kab. Sumenep

Sumber: Diolah Penulis, 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum untuk daerah perkotaan seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Blitar, dan Kota Kediri memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi dan RBMKL yang tinggi pula. Kecuali pada Kota Blitar dan Kota Mojokerto, besaran BMKL daerah-daerah pada kuadran II termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk Kota Blitar dan Kota Mojokerto, tingginya RBMKL disebabkan oleh rendahnya PDRB yang dihasilkan. Keseluruhan daerah ini memiliki perekonomian yang mengandalkan usaha pada sektor industri dan atau perdagangan.

Sementara itu untuk daerah-daerah yang berada di kuadran I memiliki rata-rata ketimpangan yang tinggi sementara rata-rata RBMKL rendah. daerah-daerah tersebut rata-rata memiliki BMKL yang rendah pula, kecuali untuk Kabupaten Gresik dimana rendahnya RBMKL disebabkan oleh tingginya PDRB yang dihasilkan. Selain Kabupaten Gresik dan Kabupaten Blitar, daerah pada kuadran I ini memiliki PDRB yang relatif kecil. Rata-rata daerah pada kuadran ini memiliki perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian dan sektor perdagangan, kecuali untuk Kabupaten Gresik yang perekonomiannya mengandalkan sektor industri. Daerah pada kuadran I ini rata-rata berada di bagian barat-selatan Jawa Timur.

Pada kuadran III terdapat daerah-daerah yang perekonomiannya berbasis pada sektor pertanian, kecuali untuk Kabupaten Mojokerto yang perekonomiannya berbasis sektor industri. Daerah-daerah pada kuadran III ini memiliki RBMKL tinggi dan ketimpangan rendah. Daerah-daerah di kuadran ini rata-rata merupakan pinggir selatan sebelah timur Jawa Timur. Terakhir untuk kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan ketimpangan yang rendah dan RBMKL yang rendah pula. Daerah-daerah ini rata-rata terdapat di bagian barat-utara Jawa Timur.

4.6.2 Pengaruh Belanja Modal APBD Terhadap Ketimpangan

Hasil regresi untuk variabel rasio belanja modal APBD dalam penelitian ini menghasilkan output berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya bahwa semakin besar rasio belanja modal APBD terhadap PDRB akan memberikan dampak pada naiknya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat menghambat pemerataan pendapatan.

Penambahan belanja modal APBD akan dapat menaikkan tingkat ketimpangan apabila menghasilkan rasio terhadap PDRB yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya apabila persentase kenaikan belanja modal APBD melebihi persentase kenaikan PDRB pada tahun yang sama maka akan mendorong naiknya ketimpangan pendapatan.

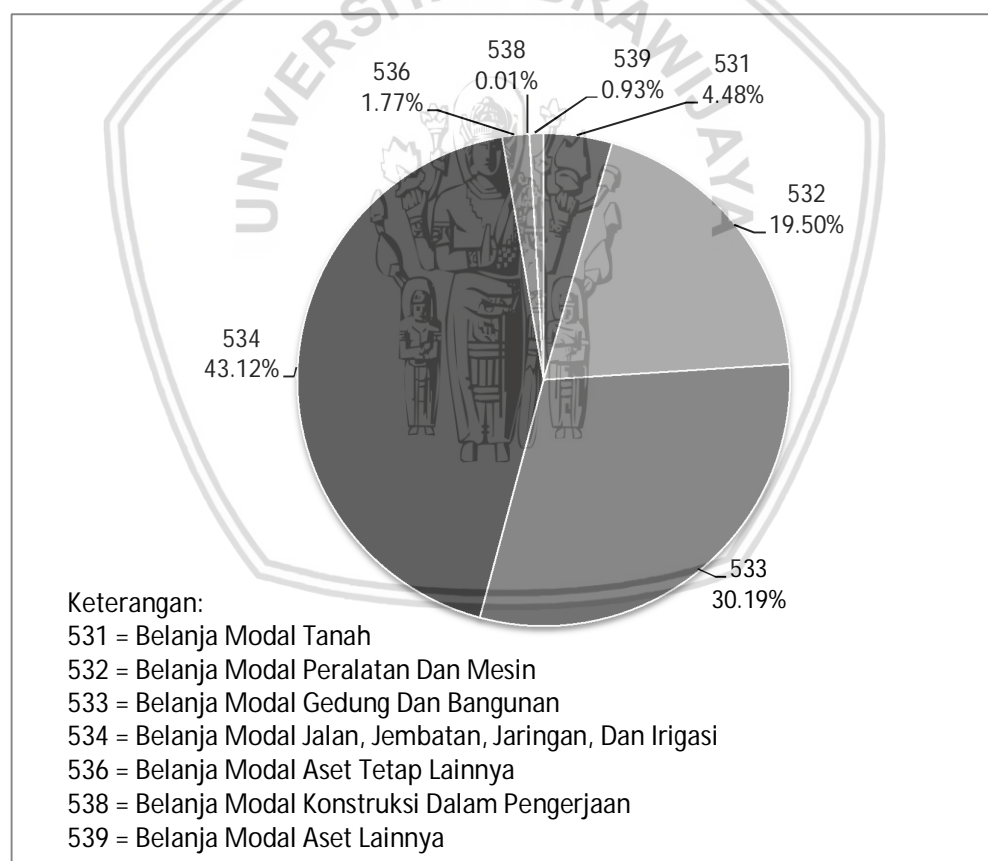
Hasil ini tidak sesuai dengan dugaan awal bahwa belanja modal APBD dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Akan tetapi hasil ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hur (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja modal berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Turnovsky (2015) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa belanja pemerintah untuk modal publik akan meningkatkan ketimpangan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Turnovsky berpendapat bahwa investasi pemerintah cenderung meningkatkan produktivitas modal swasta yang pada akhirnya terjadi ketimpangan distribusi hasil yang tidak merata antara pemilik dengan para buruh.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sabir (2015) dengan studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya bahwa peningkatan belanja modal dalam APBD akan meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja modal lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di daerah perkotaan dibandingkan alokasi di wilayah pedesaan.

Distribusi alokasi belanja modal APBD selama tahun 2010-2014 dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 4.14. Data pada gambar 4.14 diambil dari

publikasi laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang menggunakan format SAP. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa ini sebagian besar alokasi belanja modal APBD tahun 2010-2014 yaitu sebesar 54,17% dibelanjakan dalam belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal gedung dan bangunan. Ketiga jenis belanja ini pada umumnya digunakan untuk mendukung pelayanan dan operasional sehari-hari pemerintah sehingga manfaatnya bersifat lebih menyebar kepada seluruh masyarakat.

Gambar 4.14 : **Distribusi Alokasi Belanja Modal APBD Tahun 2010-2014**



Sumber: Data Diolah DJPK, 2017

Alokasi untuk belanja modal jalan, jembatan, jaringan dan irigasi mencapai 43,12%. Jenis belanja ini sangat penting untuk mendukung perekonomian suatu daerah karena menghasilkan fasilitas atau infrastruktur utama yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pembuatan jalan raya sampai pelosok daerah. Dampak dari alokasi belanja ini bisa sangat mendukung perkembangan perekonomian karena mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan kesehariannya, sehingga jenis belanja ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi perlu digarisbawahi untuk dampak jenis belanja infrastruktur terhadap ketimpangan sangat dipengaruhi kebijakan dan efektifitas pelaksanaan belanja tersebut.

Belanja infrastruktur yang terpusat pada daerah perkotaan hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi saja sehingga memperlebar tingkat ketimpangan pendapatan. Hasil ini seperti hanya penelitian yang dilakukan oleh Sabir (2015) di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu belanja infrastruktur yang ada mungkin tidak banyak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kalangan bawah khususnya para petani sehingga pertumbuhan ekonomi sebagian besar hanya dinikmati oleh para pelaku di sektor modern dan secara tidak langsung akan lebih menguntungkan para pengusaha dan pemilik modal besar.

Untuk meningkatkan peran belanja infrastruktur dalam pemerataan pendapatan masyarakat, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan belanja infrastruktur sehingga diperoleh manfaat yang lebih besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga perlu memperhatikan sebaran pembangunan yang lebih meluas agar dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat sampai daerah pinggiran. Dengan demikian diharapkan perekonomian masyarakat pinggiran

dapat lebih sejahtera sehingga ketimpangan dengan masyarakat perkotaan dapat berkurang.

Tabel 4.10 menyajikan kelompok-kelompok daerah berdasarkan besaran ketimpangan dan RBMAPBD. Dengan membagi besaran variabel berdasarkan nilai median diperoleh 19 daerah dengan kategori tinggi dan 19 daerah dengan kategori rendah pada masing-masing variabel.

Tabel 4.10: **Sebaran Daerah Berdasarkan Variabel Ketimpangan dan Rasio Belanja Modal APBD**

	RBMAPBD Rendah	RBMAPBD Tinggi
	Kuadran I	Kuadran II
Ketimpangan Tinggi	Kota Malang Kota Surabaya Kab. Malang Kab. Tulungagung Kota Kediri Kab. Sidoarjo Kab. Gresik	Kota Madiun Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Mojokerto Kab. Ponorogo Kota Pasuruan Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kota Batu Kab. Pacitan Kab. Nganjuk Kab. Magetan
	Kuadran IV	Kuadran III
Ketimpangan Rendah	Kab. Probolinggo Kab. Jember Kab. Mojokerto Kab. Banyuwangi Kab. Sumenep Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Pasuruan Kab. Tuban Kab. Lumajang Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro	Kab. Pamekasan Kab. Situbondo Kab. Sampang Kab. Bondowoso Kab. Ngawi Kab. Bangkalan Kab. Madiun

Sumber: Diolah Penulis, 2018

Dalam tabel 4.10 tersebut, kuadran I dihuni oleh daerah-daerah dengan RBMAPBD rendah dan ketimpangan tinggi. Daerah-daerah ini merupakan daerah dengan PDRB yang tinggi. Terdapat Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki andil besar dalam penyusun PDRB di Jawa Timur. Rendahnya RBMAPBD disebabkan oleh tingginya PDRB yang dihasilkan. Dengan tingginya tingkat perekonomian daerah, sudah sewajarnya jika prioritas pemerintah daerah pada kuadran I ini lebih fokus pada penurunan ketimpangan pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat lebih merata.

Kuadran II ditempati oleh daerah-daerah dengan RBMAPBD tinggi dan ketimpangan yang tinggi pula. Tingginya RBMAPBD disebabkan oleh rendahnya PDRB yang dihasilkan. Daerah-daerah pada kuadran ini rata-rata memiliki sektor perdagangan yang sedang berkembang pesat. Sementara sumbangan sektor industri rata-rata tidak terlalu tinggi. Efektivitas pelaksanaan belanja modal APBD harus diperbaiki agar dapat berperan dalam penurunan ketimpangan pendapatan. Belanja modal APBD dapat dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor padat karya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan.

Pada kuadran III terdapat daerah-daerah yang perekonomiannya mayoritas disumbang oleh sektor pertanian. Daerah pada kuadran ini memiliki RBMAPBD yang tinggi sementara ketimpangannya rendah. Tingginya RBMAPBD disebabkan oleh rendahnya PDRB yang dihasilkan. Dukungan belanja modal infrastruktur baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi sangat diperlukan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk kuadran IV ditempati oleh daerah-daerah yang memiliki ketimpangan rendah dan RBMAPBD yang rendah pula. Daerah-daerah ini rata-rata memiliki PDRB yang cukup tinggi. Rata-rata daerah dalam kuadran IV ini merupakan daerah di bagian timur-tengah Jawa Timur. Daerah-daerah ini dapat berkembang dengan cukup baik dengan memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat.

4.6.3 Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan

Hasil regresi untuk variabel rasio PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB dalam penelitian ini menghasilkan output berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Artinya perubahan besaran dari variabel ini tidak banyak berpengaruh terhadap kondisi ketimpangan yang ada. Lemahnya pengaruh perkembangan PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan kemungkinan besar dikarenakan kecinya nilai tambah yang dihasilkan para petani atas hasil pertaniannya. Hasil pertanian yang sebagian besar dijual berupa bahan mentah menghasilkan nilai tambah yang tidak sebesar apabila sudah melalui proses pengolahan. Selain itu keuntungan lebih tinggi mungkin didapat oleh para pedagang dan pengepul hasil pertanian sehingga bagian keuntungan yang menjadi hak para petani akan berkurang.

Kontribusi sektor pertanian yang semakin menurun dari tahun ke tahun juga mengakibatkan dampak sektor pertanian tidak dapat secara signifikan menurunkan ketimpangan. Menurunnya kontribusi sektor pertanian kemungkinan disebabkan oleh semakin menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Berdasarkan data BPS, luas lahan pertanian di Jawa Timur seluas 1.107.276 hektar pada tahun 2010. Luas lahan tersebut turun menjadi 1.091.752 hektar pada tahun 2015 atau turun sebanyak

15.524 hektar yang merupakan akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman, industri, dan sebagainya. Selain itu terdapat pula penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian yang mempengaruhi hasil pertanian dimana pada tahun 2010 jumlah pekerja sektor pertanian sebanyak 7.939.480 jiwa dan pada tahun 2015 turun menjadi 7.083.252 jiwa atau turun sebesar 10,78% dibanding tahun 2010 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2016).

Hasil ini mendukung pendapat Kuznets bahwa akan terjadi pergeseran struktur ekonomi dimana peran perekonomian tradisional seperti sektor pertanian akan menurun dan bergeser ke sektor modern. Hasil ini juga mendukung Teori Penyebab Kumulatif yang dicetuskan Profesor Gunnar Myrdal yang menyatakan terjadinya migrasi tenaga kerja, modal, dan perdagangan ke daerah yang memberikan harapan laba yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, wilayah dengan basis sektor pertanian menjadi daerah dengan harapan laba yang lebih rendah.

4.6.4 Pengaruh Sektor Industri Terhadap Ketimpangan

Hasil regresi untuk variabel rasio PDRB sektor industri dalam penelitian ini menghasilkan output berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya perubahan besaran dari variabel ini cukup berpengaruh terhadap kondisi ketimpangan yang ada. Semakin besar rasio PDRB sektor industri terhadap total PDRB akan memberikan dampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Peningkatan PDRB sektor industri akan dapat menurunkan tingkat ketimpangan apabila menghasilkan rasio terhadap PDRB yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya apabila persentase kenaikan PDRB sektor industri melebihi persentase kenaikan PDRB pada tahun yang sama maka akan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain bahwa peningkatan

peran atau kontribusi sektor industri dalam perekonomian akan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan rasio PDRB sektor industri memiliki dampak yang baik terhadap pemerataan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan pendapat Kuznets bahwa semakin besar peran sektor industri modern akan meningkatkan ketimpangan pendapatan yang disebabkan karena sektor industri modern memiliki karakteristik kesempatan kerja yang terbatas tetapi memiliki tingkat upah dan produktivitas yang tinggi.

Peran sektor industri yang dapat menurunkan ketimpangan dapat terjadi karena tidak selamanya tingkat pengembalian mayoritas menjadi milik pemilik modal. Sektor industri di Jawa Timur memiliki karakteristik padat karya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memberi para pekerja penghasilan yang lebih layak, dengan perbedaan tingkat penghasilan yang tidak terlalu timpang dibandingkan sektor lainnya. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor ini. Dengan perkembangan kontribusi terhadap PDRB yang relatif stabil, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja tambahan sebanyak 217.113 jiwa selama tahun 2010-2015 atau naik sebesar 8,75%, dari yang awalnya sebanyak 2.482.563 jiwa pekerja di tahun 2010 menjadi 2.699.676 jiwa pekerja di tahun 2015 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2016).

Hasil ini mendukung pendapat Kuznets bahwa akan terjadi pergeseran struktur ekonomi dimana peran perekonomian tradisional akan menurun dan bergeser ke sektor modern seperti sektor industri. Melihat hasil penelitian ini dan juga perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Timur, maka dapat dilihat bahwa sektor industri mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi dan perkembangan sektor industri pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

Hasil ini juga mendukung Teori Penyebab Kumulatif yang dicetuskan Profesor Gunnar Myrdal yang menyatakan terjadinya migrasi tenaga kerja, modal, dan perdagangan ke daerah yang memberikan harapan laba yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, wilayah dengan basis sektor industri menjadi salah satu daerah yang memberikan harapan laba tinggi. Alih fungsi lahan pertanian merupakan cerminan pergeseran modal yang diantaranya digunakan untuk keperluan sektor industri. Bergitu pun penurunan tenaga kerja di sektor pertanian yang kontras dengan peningkatan tenaga kerja di sektor industri juga menjadi indikasi migrasi tenaga kerja. Perdagangan hasil pertanian pun menjadi pasokan komoditas bahan baku untuk sektor industri.

Tabel 4.11 menyajikan kelompok-kelompok daerah berdasarkan besaran ketimpangan dan rasio PDRB sektor industri. Dengan membagi besaran variabel berdasarkan nilai median diperoleh 19 daerah dengan kategori tinggi dan 19 daerah dengan kategori rendah pada masing-masing variabel. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kota-kota besar berada di kuadran II dengan ketimpangan tinggi dan rasio PDRB sektor industri yang tinggi pula. Terdapat Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik yang termasuk daerah dengan perekonomian yang maju di Jawa Timur. Daerah di kuadran ini rata-rata memiliki PDRB yang relatif tinggi. Selain itu daerah-daerah di kuadran ini juga memiliki rasio PDRB sektor pertanian yang relatif rendah.

Di kuadran I terdapat daerah-daerah di sekitar selatan-barat Jawa Timur. Daerah di kuadran I memiliki ketimpangan tinggi dan rasio PDRB sektor industri rendah. Rata-rata daerah di kuadran ini memiliki perekonomian yang ditopang oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan. Daerah-daerah ini juga memiliki PDRB yang relatif kecil. Pengembangan sektor industri sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian daerah-daerah ini.

Tabel 4.11: **Sebaran Daerah Berdasarkan Variabel Ketimpangan dan Rasio PDRB Sektor Industri**

	RPDRBIND Rendah	RPDRBIND Tinggi
Ketimpangan Tinggi	Kuadran I Kota Blitar Kota Mojokerto Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kota Batu Kab. Pacitan Kab. Nganjuk Kab. Magetan	Kuadran II Kota Madiun Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Malang Kota Surabaya Kab. Malang Kab. Tulungagung Kota Kediri Kab. Sidoarjo Kab. Gresik
	Kuadran IV Kab. Pamekasan Kab. Situbondo Kab. Sampang Kab. Ngawi Kab. Bangkalan Kab. Madiun Kab. Banyuwangi Kab. Sumenep Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro	Kuadran III Kab. Bondowoso Kab. Probolinggo Kab. Jember Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Pasuruan Kab. Tuban Kab. Lumajang

Sumber: Diolah Penulis, 2018

Kuadran III ditempati oleh daerah-daerah dengan ketimpangan rendah dan rasio PDRB sektor industri tinggi. Daerah-daerah di kuadran ini rata-rata berada di bagian tengah-timur Jawa Timur. Daerah di kuadran ini memiliki PDRB yang relatif tinggi. Sedangkan kuadran IV ditempati oleh daerah di sekitar Jawa Timur bagian utara dan daerah di Pulau Madura. Perekonomian daerah di kuadran IV disumbang oleh PDRB sektor pertanian yang cukup besar. Pengembangan sektor industri juga diperlukan oleh daerah-daerah di kuadran IV ini untuk mendukung perekonomian sekaligus menjaga tingkat pemerataan pendapatan masyarakat.

4.6.5 Pengaruh Sektor Perdagangan Terhadap Ketimpangan

Hasil regresi untuk variabel rasio PDRB sektor perdagangan dalam penelitian ini menghasilkan output berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya bahwa semakin besar rasio PDRB sektor perdagangan terhadap total PDRB akan memberikan dampak pada naiknya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat menghambat pemerataan pendapatan.

Peningkatan PDRB sektor perdagangan akan dapat menaikkan tingkat ketimpangan apabila menghasilkan rasio terhadap PDRB yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya apabila persentase kenaikan PDRB sektor perdagangan melebihi persentase kenaikan total PDRB pada tahun yang sama maka akan dapat mendorong naiknya ketimpangan pendapatan. Dampak positif PDRB sektor perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan kemungkinan disebabkan oleh keuntungan yang lebih besar yang didapatkan para pedagang, yang sekaligus dapat mengurangi keuntungan bagi para penghasil barang yang diperdagangkan seperti misalnya hasil pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga memperlebar ketimpangan antara para pelaku usaha di sektor perdagangan dengan sektor primer khususnya pertanian. Selain itu terdapat indikasi adanya upah yang rendah bagi para pekerja di sektor perdagangan yang cukup timpang dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik modal sehingga perkembangan sektor perdagangan tidak setara dengan peningkatan kesejahteraan para pekerjanya.

Hasil ini juga mendukung Teori Penyebab Kumulatif yang menyatakan terjadinya migrasi perdagangan ke daerah yang memberikan harapan laba yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, wilayah dengan basis sektor perdagangan menjadi

salah satu daerah yang memberikan harapan laba tinggi. Aktivitas perdagangan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada sektor pertanian terutama sebagai pemasaran hasil sektor pertanian dan pemasaran hasil sektor industri, sekaligus penyalur perdagangan hasil pertanian sebagai pasokan komoditas bahan baku untuk sektor industri.

Tabel 4.12 menyajikan kelompok-kelompok daerah berdasarkan besaran ketimpangan dan rasio PDRB sektor perdagangan. Dengan membagi besaran variabel berdasarkan nilai median diperoleh 19 daerah dengan kategori tinggi dan 19 daerah dengan kategori rendah pada masing-masing variabel. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa daerah perkotaan, kecuali Kota Kediri, rata-rata masuk dalam kuadran II yaitu daerah dengan ketimpangan dan rasio PDRB sektor perdagangan yang sama-sama tinggi. Daerah perkotaan umumnya menjadi tujuan para penghasil bahan mentah untuk menjual barang dagangannya.

Sementara itu kuadran I hanya dihuni oleh empat daerah yaitu Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Magetan. Keempat daerah ini memiliki kontribusi sektor perdagangan yang cukup rendah. Untuk Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik merupakan daerah yang menjadi basis usaha industri dengan tingkat PDRB yang termasuk tinggi pula. Sedangkan Kabupaten Magetan merupakan salah satu daerah berbasis pertanian dengan PDRB yang termasuk kategori rendah.

Kuadran III, yang merupakan daerah dengan ketimpangan rendah dan rasio PDRB sektor perdagangan tinggi, juga dihuni oleh empat daerah yaitu kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Lamongan. Sedangkan kuadran IV diisi oleh 15 kabupaten dengan ketimpangan

yang rendah dan rasio PDRB sektor perdagangan yang rendah pula. Daerah-daerah ini rata-rata berada di bagian utara Jawa Timur.

Tabel 4.12: **Sebaran Daerah Berdasarkan Variabel Ketimpangan dan Rasio PDRB Sektor Perdagangan**

	RPDRBDAG rendah	RPDRBDAG tinggi
Ketimpangan Tinggi	<p>Kuadran I</p> <p>Kota Kediri Kab. Sidoarjo Kab. Gresik Kab. Magetan</p>	<p>Kuadran II</p> <p>Kota Madiun Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Malang Kota Surabaya Kab. Malang Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Mojokerto Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kota Batu Kab. Pacitan Kab. Nganjuk</p>
Ketimpangan Rendah	<p>Kuadran IV</p> <p>Kab. Bondowoso Kab. Probolinggo Kab. Jember Kab. Mojokerto Kab. Pasuruan Kab. Tuban Kab. Lumajang Kab. Situbondo Kab. Sampang Kab. Ngawi Kab. Bangkalan Kab. Madiun Kab. Banyuwangi Kab. Sumenep Kab. Bojonegoro</p>	<p>Kuadran III</p> <p>Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Pamekasan Kab. Lamongan</p>

Sumber: Diolah Penulis, 2018

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Belanja modal K/L berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Timur. Artinya penambahan belanja modal K/L dapat memberikan dampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan apabila kenaikannya melebihi tingkat perubahan PDRB pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal K/L cukup efektif dalam mendukung pemerataan pendapatan masyarakat.
2. Belanja modal APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Timur. Artinya penambahan belanja modal APBD dapat memberikan dampak pada naiknya tingkat ketimpangan pendapatan apabila kenaikannya melebihi tingkat perubahan PDRB pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal APBD belum efektif dalam mendukung pemerataan pendapatan masyarakat.

5.2 Saran

Menimbang kesimpulan yang telah diambil, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah dapat menjadikan variabel rasio belanja modal K/L dan rasio belanja modal APBD sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan anggaran.
2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan khususnya pada belanja modal APBD agar dapat turut berperan dalam penurunan ketimpangan pendapatan.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan belanja infrastruktur dan memperluas pembangunan hingga ke pelosok daerah agar dampak dari belanja infrastruktur dapat lebih berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat pinggiran.
4. Pemerintah daerah yang memiliki PDRB tinggi seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo seharusnya mulai mengalihkan perhatiannya pada pemerataan pendapatan sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
5. Dukungan belanja modal infrastruktur sangat diperlukan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk mendorong pembangunan ekonomi pada Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. [Seri 2010] Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2016 (Persen). (<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/959/-seri-2010-distribusi-pdrb-terhadap-jumlah-pdrb-34-provinsi-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi-2010-2016-persen-.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____. 2018. Gini Ratio Provinsi 2002-2017. (<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2017.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____. 2018. Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan Menurut Pengeluaran. Tabel Dinamis. diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____. 2018. PDRB ADH Berlaku Menurut Pengeluaran. Tabel Dinamis. diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2010-2014*.
- _____. 2016. Gini Rasio Jawa Timur 2008 – 2015. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2016/10/13/10/gini-rasio-jawa-timur-2008---2015.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____. 2016. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2005 – 2015. (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/10/12/358/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-kabupaten-kota-dan-lapangan-pekerjaan-utama-tahun-2005---2015.html>) diakses pada tanggal 17 April 2018.
- _____. 2017. Distribusi PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/36/distribusi-pdrb-provinsi-jawa-timur-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-persen-.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____. 2017. PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/34/pdrb-provinsi-jawa-timur-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-milyar-rupiah-.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*.
- _____. 2018. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Terhadap PDRB 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/16/207/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-terhadap-pdrb-38-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2010-2016.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____. 2018. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/16/223/pdrb-atas-dasar->

harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2010-2016.html)
diakses pada tanggal 9 Februari 2018.

_____. 2018. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/16/221/pdrb-perkapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2010-2016.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.

Barro, Robert J. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth. *Journal of Political Economy*, Vol. 98, Ed. 5, PP 103–125. (<https://doi.org/10.1086/261726>) diakses pada tanggal 17 Februari 2018.

Boediono. 1982. *Ekonomi Makro*. BPFE FEB UGM: Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. Data Keuangan Daerah Setelah 2006. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>) diakses pada tanggal 4 Februari 2018.

Gujarati, D. N., Dawn C. Porter. 2008. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin – USA

Hakim, Lukman. 2014. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang.

Hur, Seok-Kyun. 2014. Government Spending and Inclusive Growth in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series No. 415*, PP 1-39. (<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149219/ewp-415.pdf>) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.

Ivanic, Maros, Will Martin. 2017. Sectoral Productivity Growth and Poverty Reduction: National and Global Impacts. *World Development*. (<http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.004>) diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

Jhingan, M.L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers: Jakarta.

Kuznet, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, Vol. 45, No. 1, PP 1-28. (<http://www.jstor.org/stable/1811581>) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.

Latumaerissa, Julius R. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Mitra Wacana Media: Jakarta.

López, J. . 2010. *Pro-growth, pro-poor: Is there a trade-off*. The World Bank (PRMPR). (http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/15040_WBSWP3378.pdf) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.

Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi: Edisi Keenam*. Penerbit Erlangga: Jakarta.

Okun, A. M. 1975. *Equality and Efficiency: The Big Tradeoff*. [https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/docs/OKUN_EQUALITY_AND_EFFICIENCY_\(AS08\).PDF](https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/docs/OKUN_EQUALITY_AND_EFFICIENCY_(AS08).PDF)) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.

- Rubin, A., & Segal, D. 2015. The effects of economic growth on income inequality in the US. *Journal of Macroeconomics*, Vol. 45, PP 258–273. (<https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2015.05.007>) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.
- Sabir, Yustika, A. E., Susilo, & Maskie, G. 2015. Local Government Expenditure, Economic Growth and Income Inequality in South Sulawesi Province. *Journal of Applied Economics and Business* Vol. 3, Ed. 2, PP 61–73. (<http://www.aebjournal.org/articles/0302/030205.pdf>) diakses pada tanggal 3 Februari 2018.
- Shin, I. 2012. Income inequality and economic growth. *Economic Modelling*, Vol. 29, Ed. 5, PP 2049–2057. (<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.011>) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.
- Sukirno, Sadono. 2017. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana: Jakarta.
- Todaro, Michael P., Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesebelas*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Todaro, Michael P., Stephen C. Smith. 2012. *Economic Development 11th Ed*. Pearson Higher Ed. USA.
- Turnovsky, S. J. 2015. Economic growth and inequality: The role of public investment. *Journal of Economic Dynamics and Control*, Vol. 61, PP 204–221. (<https://doi.org/10.1016/j.jedc.2015.09.009>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Utama, Zamrud Siswa. 2017. *Pengaruh Kebijakan Fiskal pada Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus 1980-2015*. Tesis. Universitas Brawijaya: Malang.

Lampiran 1

Persamaan Matematis Seri Geometri Tak Terhingga

$$\Delta Y/\Delta G = 1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots + MPC^n \dots\dots\dots(1)$$

Kalikan kedua sisi persamaan dengan MPC

$$MPC(\Delta Y/\Delta G) = MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots + MPC^n \dots\dots\dots(2)$$

Ambil persamaan (2) dari persamaan (1)

$$(\Delta Y/\Delta G) - (MPC(\Delta Y/\Delta G)) = 1$$

Ubah persamaan menjadi

$$(\Delta Y/\Delta G)(1 - MPC) = 1$$

$$\text{Maka } \Delta Y/\Delta G = 1/(1 - MPC)$$

Persamaan tersebut dapat dihitung pula menggunakan derivasi metode kalkulus

$$Y = C(Y - T) + I + G$$

Dengan mempertahankan T dan I tetap, dideferensiasikan untuk memperoleh

$$dY = C'dY + dG$$

dan tata kembali untuk mendapatkan

$$dY/dG = 1/(1-C')$$

Lampiran 2

Hasil Pengujian Menggunakan EViews 9

1. Pemilihan Spesifikasi Model Terbaik

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: GINIJATIM1
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.655921	(37,185)	0.0000
Cross-section Chi-square	125.127698	37	0.0000

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: GINIJATIM1
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.497206	5	0.0001

2. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/19/18 Time: 19:13
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RBMKL	-2.409618	0.992726	-2.427274	0.0162
RBMAPBD	1.801513	0.559401	3.220431	0.0015
RPDRBTAN	-0.274091	0.292699	-0.936427	0.3503
RPDRBIND	-0.898113	0.504133	-1.781500	0.0765
RPDRBDAG	1.515984	0.478831	3.166008	0.0018
C	0.280980	0.137201	2.047940	0.0420

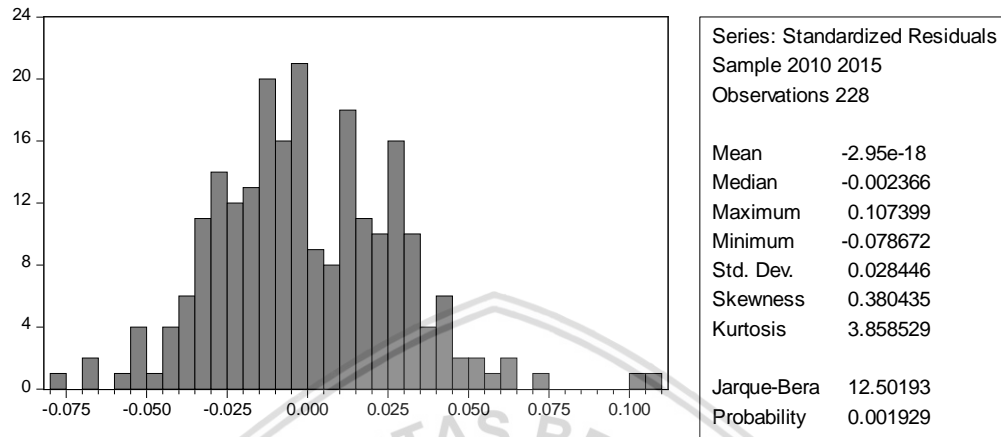
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.590359	Mean dependent var	0.309912
Adjusted R-squared	0.497359	S.D. dependent var	0.044445
S.E. of regression	0.031510	Akaike info criterion	-3.908822
Sum squared resid	0.183682	Schwarz criterion	-3.262060
Log likelihood	488.6057	Hannan-Quinn criter.	-3.647873
F-statistic	6.347966	Durbin-Watson stat	2.125242
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Multikolinearitas

	GINI	RBMKLPDRB	RBMABDPDRB	RPDRBTAN	RPDRBIND	RPDRBDAG
GINI	1.0000	0.1469	0.0967	-0.4550	0.1136	0.4412
RBMKLPDRB	0.1469	1.0000	0.0932	-0.1638	-0.1826	0.3531
RBMABDPDRB	0.0967	0.0932	1.0000	0.1324	-0.5255	0.2831
RPDRBTAN	-0.4550	-0.1638	0.1324	1.0000	-0.5131	-0.4001
RPDRBIND	0.1136	-0.1826	-0.5255	-0.5131	1.0000	-0.1637
RPDRBDAG	0.4412	0.3531	0.2831	-0.4001	-0.1637	1.0000

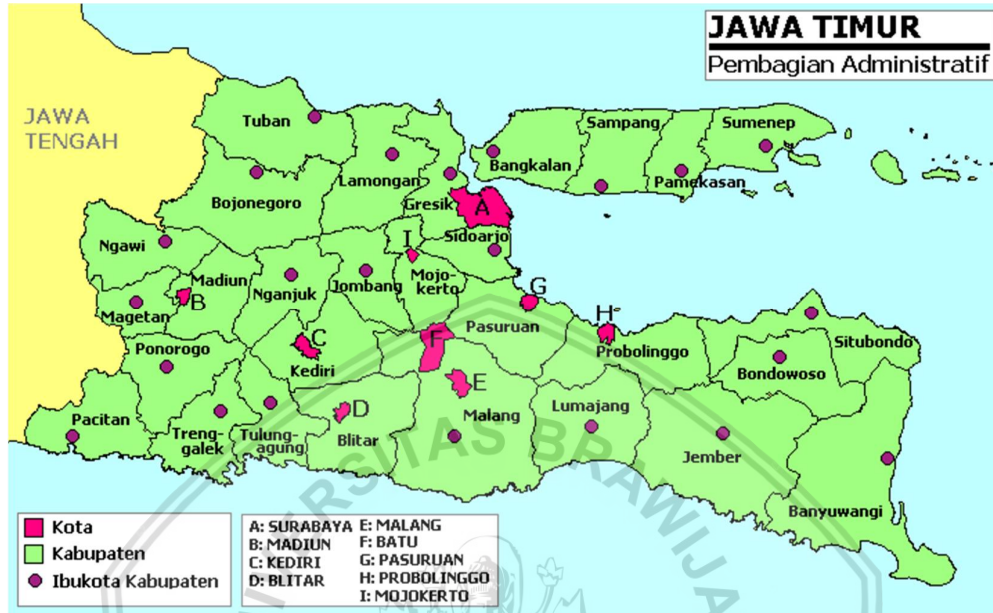
c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.965803	Prob. F(20,207)	0.5052
Obs*R-squared	19.45978	Prob. Chi-Square(20)	0.4921
Scaled explained SS	19.76018	Prob. Chi-Square(20)	0.4730

Lampiran 3

Peta Jawa Timur



Peta Jawa Timur Lengkap Dengan Daftar 29 Nama Kabupaten dan 9 Kota
 (<https://www.kopi-ireng.com/2017/01/Peta-Jawa-Timur-Lengkap-Dengan-Daftar-29-Nama-Kabupaten-dan-9-Kota.html>)